

Menuju Perencana Profesional

SIMPUL

Perencana

Volume 17 | Tahun 8 | Desember 2011



**MENYELAMI SINERGI DAN KOMPLEKSITAS
PERENCANAAN DI PUSAT DAN DAERAH**

ISSN 1693-4229

E-Mail : simpul@bappenas.go.id



SOEDIRMAN

Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini
tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup
tetap menuntu bela, siapapun lawan yang aku hadapi

Jogjakarta, 17 Agustus 1948

SUSUNAN REDAKSI:

SIMPUL PERENCANA

Diterbitkan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (PUSBINDIKLATREN BAPPENAS).

PELINDUNG :

Menteri PPN/Kepala BAPPENAS

PENASEHAT :

SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS

PENANGGUNG JAWAB :

Kepala Pusbindiklatren

PEMIMPIN UMUM :

Zamilah Chairani

PEMIMPIN REDAKSI :

Wiwit Kuswidiati

DEWAN REDAKSI :

Guspika, Haryanto, Hari Nasiri, Meily Djohar, Wahyu Pribadi, Edy Purwanto

REDAKTUR PELAKSANA :

Edy Susanto, Maslakah Murni,

Wiky Witarni, Rita Miranda,

Wahyu Ris Indarko

EDITOR :

Tim Simpul

GRAFIS & LAYOUT :

Hendra Yudiyanto

ADMINISTRASI / KEUANGAN :

Lina Indriawati, Dwi yanto

DISTRIBUSI/SIRKULASI :

Sugiyanti

ALAMAT REDAKSI :

Pusbindiklatren Bappenas

Jl. Sunda Kelapa No.9 Jakarta, 10310

Telp .(021) 319 31 447

E-Mail : simpul@bappenas.go.id

Redaksi menerima tulisan yang berhubungan dengan perencanaan. Tulisan bisa dikirim kapan saja. Tulisan yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.



DARI KAMI

Pembaca yang budiman,

Hampir 1 tahun kita lewati dalam masa 2011. Telah banyak hal-hal baik yang kita capai dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan kita, keluarga dan masyarakat dengan melakukan dan menjalankan tugas-tugas kita sesuai dengan kedudukan dan peran yang kita miliki. Setahun terlewat menjadi bahan evaluasi untuk melangkah kedepan menjadi lebih baik. Begitu pula yang kami lakukan di Pusbindiklatren, sebagai sebuah institusi yang memiliki peran dan fungsi dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk para perencana pemerintah dan pns di seluruh Indonesia, kami melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kami lakukan selama tahun 2011.

Salah satu masalah yang menonjol dalam bidang perencanaan pembangunan dan khususnya dalam rangka mencapai efektifitas, efisiensi, sinergi dan tujuan pembangunan adalah masalah "koordinasi". Sebagaimana diakui oleh Ketua Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia, (AP2I) bahwa masalah koordinasi merupakan hal yang mudah diucapkan dan selalu menjadi kata kunci dalam setiap rapat antar pelaku pembangunan di jajaran pemerintah, namun sulit dilaksanakan pada tahap implementasi kebijakan.

Sebagai hal yang menjadi kata kunci dalam setiap pertemuan antar sektor dan antar pelaku, maka koordinasi harus mendapatkan porsi dan perhatian yang serius. Koordinasi yang " baik dan benar" akan menghasilkan sinergi, integrasi dan efektifitas pembangunan. Koordinasi harus dilakukan sejak perencanaan hingga evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka melihat posisi dan peran Pusbindiklatren, maka dalam Simpul Perencana volume 17 ini, kami sengaja menyoroti peran Pusbindiklatren dalam memfasilitasi proses perencanaan yang efektif dengan merancang pelatihan-pelatihan non gelar bagi perencana di instansi perencanaan pusat dan daerah.

Salam Simpul

hal.6 | CAKRAWALA:

**MEMBANGUN SINERGI
DENGAN TURUN LANGSUNG KE DAERAH**



Heri Suharmanto
Perencana Madya di Bappenas

Untuk membangun sinergi pemerintah pusat harus sering berkunjung ke daerah, turun langsung ke lapangan, jangan hanya dibalik meja. Kelemahan kita sebenarnya kurang fokus antara target dan prioritas, ya itulah yang kita butuhkan adalah pemimpin yang tegas. Bagaimana uraiannya?
Baca..... **hal. 6**

**CAPACITY BUILDING DAN PEMANFAATANNYA
PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN**



DR. Agus Pramusinto, MDA
Peneliti dan Ketua Pengelola
di Magister Administrasi Publik (MAP),
Universitas Gadjah Mada

Ketika bicara demokratisasi, dulu orang berbicara apa yang dilakukan pemerintah tahun lalu bisa jadi pegangan terus untuk perencanaan tahun berikutnya. Namun ketika kita bicara masyarakat yang sudah sensitif seiring kemajuan teknologi informasi bisa berjalan cepat, tuntutan seperti itu tidak bisa menunggu perencanaan tahun depan
Baca..... **hal. 10**

**KEBERHASILAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DITENTUKAN OLEH OPTIMALISASI SELURUH SUMBER
DAYA YANG ADA**



Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D
Kepala Sub Direktorat Analisa Sosial dan
Ekonomi Regional
Bappenas

Proses perencanaan pembangunan ke depan harus menyangkut pembahasan seluruh sumber daya yang ada, sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sistem pengendalian dan evaluasi yang terintegrasi
Baca **hal. 14**

**DESENTRALISASI DAN OTONOMI
UNTUK KESEJAHTERAAN**



Dr. Ir. Budhi Santoso, MA
Direktur Otonomi Daerah
Bappenas

Pembangunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir belum bisa dilihat kemajuannya secara signifikan dikarenakan pemerintah daerah yang masih tergantung kepada pemerintah pusat, maka peran Bappenas untuk menyadarkan masyarakat daerah, bahwa di era otonomi daerah mereka harus melakukan perencanaan yang bersinergi dengan pemerintah pusat.
Baca..... **hal. 17**

hal.34 | WAWANCARA:



Dr. Ir. Max Hasudungan Pohan, CES, MA

Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas
Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Bappenas perlu menanggapi isu kesenjangan kapasitas institusi perencanaan pusat dan daerah terutama dalam rangka meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergi antara institusi-institusi perencanaan serta menanggapi isu-isu mutakhir. Bagaimana hasil wawancara dengan beliau?
Baca..... **hal. 32**



Drs. Wawan Hernawan, MA

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Prov. Jawa Barat

Koperasi harus menjadi ujung tombak dalam pengembangan koperasi dan UKM di daerah agar menjadi salah satu sektor penggerak perekonomian daerah. Sejauh mana Dinas Koperasi dan UKM dapat peran dan fungsinya di daerah dan apa masalah utamanya?. Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat berbagi pengalaman.
Baca..... **hal. 36**

Baca Lainnya:

GERBANG.....	5
Forum AP2I.....	24
Info Beasiswa.....	25
Liputan.....	39
Sosok Alumni.....	47
Akademika.....	49
Opini.....	54
Selingan.....	66

KOORDINASI DAN SINKRONISASI MENUJU SINERGI

GERBANG



Judul di atas adalah adalah cita-cita yang terkandung dalam setiap proses perencanaan. Apakah hal itu sudah terjadi di negeri tercinta kita? Sebuah pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab dengan sekedar YA atau TIDAK yang pendek. Proses koordinasi dan sinkronisasi dapat terlaksana dengan baik jika pihak-pihak yang melakukannya mempunyai persepsi, kompetensi dan kapasitas yang sama atau setara. Mengingat pentingnya proses ini, Majalah Simpul Perencana kali ini bermaksud mengupas kompleksitas dan sinergi proses Perencanaan Pembangunan.

Kompleksitas proses koordinasi dan sinergi antara intansi perencanaan di pusat dan daerah semakin menjadi tantangan dengan adanya perbedaan kompetensi dan kapasitas instansi perencanaan di pusat dan daerah. Hal ini tercermin dari pernyataan dan tulisan para narasumber.

Ketua Pengelola Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada (Dr. Agus Pramusinto, MDA) menyatakan sebenarnya kondisi kapasitas institusi perencana di pusat dan daerah sudah cukup baik, hanya pemanfaatan SDM di daerah yang kurang optimal. Yang menjadi masalah adalah sistem nya. Tiga pihak yang terlibat dalam proses perencanaan (masyarakat, teknokrat dan politisi) masih sering bertabrakan kepentingan. Beliau mengajukan pemikiran-pemikiran bagaimana menanggulangi hal ini dalam rubrik Caktawala.

Dalam rubrik Wawancara, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah (Dr. Ir. Max H. Pohan, CES, MA) menyatakan dengan tegas "*planning is a must*", bukan hanya di tingkat organisasi pemerintah dan swasta nasional maupun daerah, tetapi juga di tingkat organisasi masyarakat dan individual. Dalam usaha menyimaki perbedaan kapasitas instansi pemerintah di pusat dan daerah, menurut Direktur Otonomi Daerah, Bappenas (Dr. Budhi Santoso), harus berpangkal pada desentralisasi atau otonomi daerah. Tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga pemerintah daerah harus diberi kapasitas dan penguatan sehingga


mampu mensejahterakan masyarakat di daerahnya. Perbedaan kapasitas lembaga pemerintahan di pusat dan daerah masih terasa, menurut beliau, dan hal ini penyebab belum tercapainya sinergi pusat dan daerah.

Secara lebih spesifik, Dr. Sumedi Andono Mulyo, staf Direktorat Pengembangan Wilayah, Bappenas menyatakan area-area yang perlu ditingkatkan Hal ini didukung oleh Dr.Ir. Heri Suhermanto, MCP (JFP Madya Bappenas yang menjabat sebagai Direktur Pemberdayaan Koperasi dan UKM Bappenas periode tahun 2008 sd 2011), menurut beliau perbedaan kapasitas lembaga pemerintahan pusat dan daerah dapat ditanggulangi dengan pelatihan peningkatan kapasitas pemerintah daerah agar mekanisme bottom up, top down tetap berjalan sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Semua ini dapat Anda baca lebih lengkap di rubrik Cakrawala.

Dari kacamata pemerintah daerah, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat (Drs. Wawan Hernawan, MA), walaupun proses perencanaan dapat diselesaikan bersama, namun belum sepenuhnya menangkap dan menyediakan sesuatu yang menjadi kebutuhan nyata dan mensejahterakan masyarakat. Sayang sekali, masukan dari sisi pandang Kementerian Koperasi dan UKM, tidak berhasil kami dapatkan untuk melengkapi Majalah Simpul Perencana Vol.17 ini.

Akhirul kata, kondisi perbedaan kemampuan dan kapasitas pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota ini sudah dirasakan sejak tahun 2000, ketika desentralisasi otonomi daerah diluncurkan. Hal ini kemudian diangkat menjadi isu dan fokus perhatian pemerintah di tahun 2010 yang kemudian ditindaklanjuti oleh BAPPENAS dengan merancang ulang disain non-gelar bagi perencana di instansi pusat dan daerah menjadi diklat-diklat (1) PPD RPJMD, (2) Diklat *Public Private Partnership*, (3) *Pro-poor Planning and Budgeting* (P3B) dan (4) Mitigasi Bencana. Akhirnya, selamat menikmati kepada segenap pembaca. Salam dari redaksi.

(ran)



MEMBANGUN SINERGI DENGAN TURUN LANGSUNG KE DAERAH

Oleh: Dr. Ir. Herry Suhermanto, MCP *)



Beberapa waktu lalu presiden menganggap dokumen perencanaan baik horizontal maupun vertikal tersebut belum sinkron. Namun ternyata hal tersebut memiliki kompleksitas. Kita ingin fokus bagaimana penyusun kebijakan/pembuat dokumen perencanaan itu bisa memahami sehingga bisa melakukan koordinasi. Di titik itulah Pusbindiklatren mengambil peran di sisi *capacity building*.

Bappenas selama ini telah melakukan koordinasi dengan dinas –dinas terkait di daerah dalam rangka perencanaan pembangunan, karena hal tersebut sudah menjadi tupoksi Bappenas. Koordinasi ke daerah harus melalui Kementerian. Mekanismenya dimulai dengan surat menyurat, kunjungan dan agenda koordinasi. Sebelum kembali ke pusat biasanya hasil kunjungan tersebut dilaporkan ke dinas terkait lengkap dengan monitoring, evaluasi dan kajian. Jadi jika berkunjung ke daerah akan diisi dengan agenda kerja direktorat.

Dengan melakukan koordinasi ke daerah dapat diambil pelajaran bagaimana memperbaiki substansi program dan kegiatan. Namun karena hal tersebut sudah diikat dengan nomenklatur keuangan, maka inovasi-inovasi baru tersebut hanya dapat dimasukkan kedalam kegiatan-kegiatan yang relevan dan sudah di- set sebelumnya di nomenklatur tersebut. Masalah inovasi sulit dilakukan, padahal pemerintah mendorong inovasi tapi tidak dibuka dengan inovasi program. Banyak sisi positifnya jika Bappenas membangun sinergi

dengan daerah, yang penting harus mau turun ke daerah tidak hanya diam di balik meja.

Selama ini Bappenas telah berkoordinasi dengan Kementerian, salah satunya adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Bappenas juga turun langsung dengan bekoordinasi Dinas Koperasi dan UKM di daerah. Kita telah melihat langsung bagaimana Dinas Koperasi dan UKM mengumpulkan UKM-UKM dan bersama-sama membentuk koperasi. Mereka mengusulkan paling tidak dalam satu kecamatan memiliki satu koperasi, punya semacam jendela yang bisa dijadikan pusat promosi, dengan banyaknya anggota dan juga memiliki beberapa divisi, nantinya bisa dikembangkan bagaimana para anggotanya bisa memiliki asuransi untuk kesehatan dan juga SHU yang baik. Tentunya hal ini positif dan harus terus dibina.

Bappenas menjalin kerjasama dengan daerah melalui pelatihan-pelatihan. Jadi melatih dinas-dinas di kabupaten/kota dan provinsi. Apa yang sudah dilakukan di beberapa provinsi, kini bisa dirasakan dampak positifnya walaupun sifatnya masih uji coba. Adapun bentuk pelatihannya adalah perencanaan partisipasi. Karena tidak semua lembaga/dinas/SKPD menguasai perencanaan partisipasi. Jangan sampai pemerintah berada di luar masyarakat. Pemerintah harus masuk kedalam badan masyarakat yang mewakili rakyat. Bekerja di pemerintahan bukanlah merupakan lapangan kerja utama, lapangan kerja utama adalah UKM dan koperasi, mereka ini yang terbukti tahan krisis.

Jika kita melihat contoh di daerah, bisa ditemui Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat menggarap koperasi secara serius. Mereka turun langsung ke masyarakat bawah, menjawab langsung kebutuhan masyarakat baik, ini dilakukan kepala dinas maupun staf nya. Mereka melakukan dialog dengan koperasi-koperasi untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dan bagaimana masukan tersebut bisa menjadi masukan yang positif untuk membuat kebijakan demi kemajuan koperasi dan UKM di Jawa Barat. Namun ada juga beberapa daerah yang kurang bagus, para kepala dinas bahkan tidak tahu apa yang akan mereka kerjakan.

Karena itu Bappenas harus mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan *entrepreneurship*. Pemerintah sebagai birokrat harus bisa menangkap kreatifitas dari dunia usaha lalu menerjemahkan kedalam kebijakan yang tepat. Inovasi perlu didorong untuk pengembangan koperasi dan UKM di daerah. Ke depan pemerintah perlu mem-

buat kebijakan kearah nano teknologi, kemudian mengerahkan sumberdaya untuk mendukung suatu riset. Perlu juga di pertimbangkan kapasitas pemerintah daerah yang berbeda-beda. Ada daerah yang inovatif ada juga yang kurang. Maka Bappenas harus bisa membuat pelatihan yang mampu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah.

Banyak manfaat yang berharga saat berkoordinasi dengan daerah tentunya ini menjadi catatan dalam pekerjaan pemerintah pusat, argumentasi, dan penyusunan konsep. Dari pembelajaran itu Bappenas bisa mengusulkan melalui Kementerian paling tidak mengusulkan tetap pada rel RPJMN. Kemudian inovasi-inovasi di daerah dikaji oleh Bappenas untuk dilakukan perencanaan, sedangkan eksekusinya oleh pemerintah daerah. Mekanisme *bottom up, top down* tetap berjalan. Ada program nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Melalui pelatihan-pelatihan itulah yang bisa membangun *capacity building*. Sebelum pelatihan dilakukan perlu adanya ujian guna melihat sejauh mana kemampuan peserta, kemudian setelah pelatihan dilakukan lagi ujian untuk mengetahui sampai sejauh mana peningkatan/penyerapan ilmu. Ini sudah dilaksanakan di 3 provinsi yang menggunakan dana Kementerian Koperasi dan UKM.

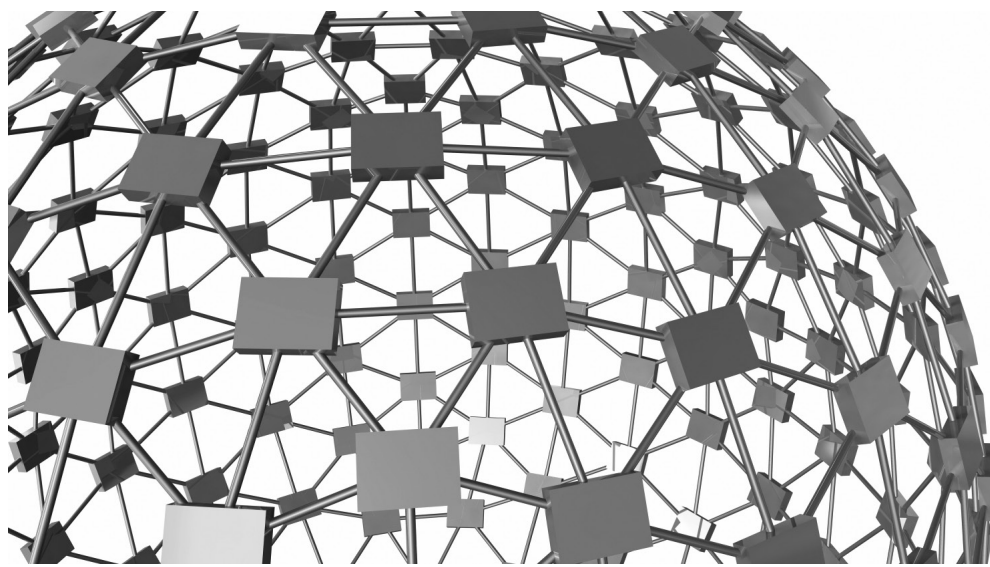
Sayangnya sekarang ini ada kekhawatiran di daerah di mana ketika membuat kebijakan, dan ternyata kebijakan tersebut salah, maka kasusnya dibawa ke ranah pidana padahal hal semacam ini cukup diselesaikan secara administratif. Karena kebijakan tersebut sifatnya mendesak dan harus segera diputuskan. Tidak semua keputusan harus selalu dibawa ke tingkat yang lebih tinggi karena ada *distribution*

of responsibility, tiap orang punya tanggung jawab masing-masing yang harus dilaksanakan.

Sebaiknya kabupaten/kota merupakan bagian elemen terpenting dari masyarakat yang di percaya oleh masyarakat dalam membuat kebijakan yang di setir oleh pusat, jangan sampai tidak sesuai dengan sosial kapital yang ada di daerah. Maka pemerintah pusat harus bisa menyetir dengan benar. Karena yang lebih tahu kondisi daerah adalah yang di daerah tersebut.

Dari sisi koordinasi, Bappenas baru tahun 2012 merencanakan penganggaran untuk koordinasi yang

lebih baik dengan daerah. Selama ini dialog lebih banyak dilakukan pada Musrenbang. Koordinasi yang cukup maju antara pusat dan daerah adalah koordinasi antara Bappenas dengan Provinsi Jawa Timur. Mereka sudah punya anggaran perencanaan pembangunan jauh sebelum Bappenas melakukan di 2012 (1M/provinsi), anggaran khusus untuk koordinasi juga tersedia. Dialog dengan daerah harus sering dilakukan oleh Bappenas paling tidak 3 kali dalam setahun, diluar Musrenbangnas. Musrenbangnas tidak harus di Pusat saja acaranya, Indonesia cukup luas bisa dipertimbangkan musrenbangnas di daerah.



Untuk membangun sinergi pemerintah pusat harus sering berkunjung ke daerah, turun langsung ke lapangan, jangan hanya dibalik meja. Kelemahan kita sebenarnya kurang fokus antara target dan prioritas, ya itulah yang kita butuhkan adalah pemimpin yang tegas.

*) **Penulis adalah Perencana Madya di Bappenas**

CAPACITY BUILDING DAN PEMANFAATANNYA PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Oleh : DR. Agus Pramusinto, MDA. *)



Dalam konteks *capacity building*, kondisi kapasitas institusi perencana di pusat dan daerah sebenarnya sudah cukup baik, artinya apa yang sudah disiapkan sejak awal tahun 90-an, Diklat-diklat seperti TMPP yang ada sudah memadai. Tetapi yang jadi persoalan adalah pemanfaatan di daerah masing-masing. Apa yang sudah di-diklatkan tidak di manfaatkan dengan serius. Jadi dari sisi kapasitas sebenarnya orang daerah sudah memenuhi kapasitas. Misalnya jika seseorang dulunya di tempatkan di institusi perencana seperti Bappeda kemudian di tugaskan di luar Bappeda, walaupun tempat lain memerlukan perencanaan, namun masalah seperti ini menjadi masalah tersendiri di daerah.

Rezim perencanaan yang kacau juga menjadi masalah tersendiri, dari rezim patok A mengawali musrenbang, rezim teknokrat di birokrasi dan rezim politik di DPRD ini yang seringkali tidak bertemu. Ini yang menjadikan satu sama lain bertabrakan. Saat perencanaan di level musrenbang ini tidak terlalu klop dengan perencanaan di SKPD. Proses perencanaannya juga tidak bersamaan, ketika kita mencoba mendudukan informasi perencanaan yang terintegrasi, berangkatnya harus sama-sama, artinya di SKPD punya rencana apa, di masyarakat punya kebutuhan apa. Itu harus ketemu dulu. Selama ini rencana sudah sulit direncanakan di level musrenbang ketika sampai pada level SKPD jadi mentah lagi karena SKPD punya rencana yang berbeda apalagi kalau kemudian masuk pada rezim politik. Orang akan merasa apa yang dilakukan di tingkat bawah merasa sia-sia di tingkat bawah karena akan selalu kalah di level SKPD.

Ini sama seperti orang daerah datang ke Pusat membawa rencana di daerah. Mereka akan marah dengan orang Bappenas, "ini kami punya rencana tolong sesuaikan dengan rencana anda". Bappenas yang punya otoritas kuat, daerah kemudian yang harus mengikuti level atas. Ini yang menimbulkan kemarahan level daerah kepada level nasional. Artinya perjalanan ini harus berjalan secara

bersama-sama. Ketika duduk dari bawah masyarakat sudah tahu apa yang di rencanakan pemerintah, masyarakat kebutuhannya apa. Hal ini seringkali *timeline* nya berbeda. Apalagi ketika masuk pada rezim DPRD yang mempunyai otoritas lebih besar lagi, bisa memotong musrenbang dan teknokratis. Jadi masalahnya pada sistem bukan SDM nya. Artinya itu yang membuat seorang perencana tidak bisa berbuat apa-apa. Sistem yang kita dibuat sebenarnya sudah punya tujuan yang baik tetapi ketika pada proses turunannya menjadi masalah. Jika waktunya tidak cocok maka menjadi masalah. Menurut saya ketika mekanisme ini tidak berjalan baik menimbulkan sikap yang apatis. Apa artinya bersusah payah datang ke musrenbang toh akhirnya yang menentukan pada level atas sehingga yang di level bawah merasa kebutuhan dan hasilnya tidak signifikan. Persepsi ini yang berbahaya.

Masalah tiga *cluster* (masyarakat, teknokrat dan politis)

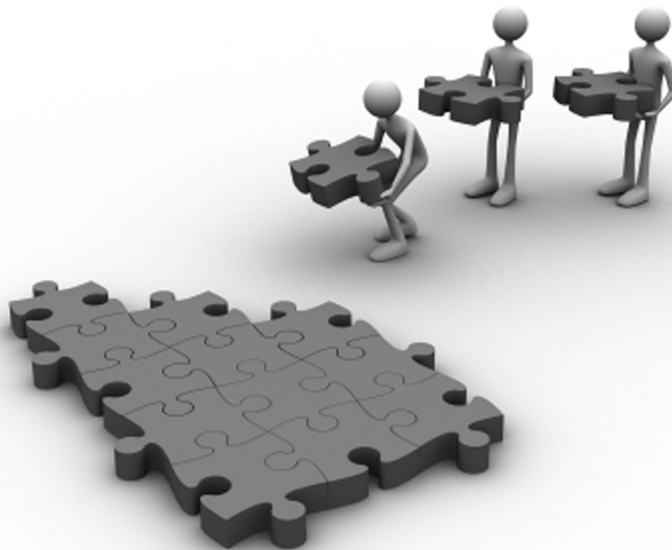
Saya pikir harus ada pembagian wilayah yang jelas antara wilayah teknokratis dan politis. Saat ini sudah terlalu dominan wilayah politisnya. Artinya peran DPRD sudah terlalu jauh ikut masuk proses penganggaran padahal DPRD cukup masuk pada prioritas kebijakan pengalokasiannya. Yang selama ini terjadi prosesnya selalu alot yang menyebabkan

tertundanya pengesahan APBD, sehingga implementasinya jadi ikut kacau.

Dilema nya antara demokratisasi dengan efektifitas. Kita perlu pemerintahan yang demokratis, perlu ada parlemen tetapi demokrasi bukan untuk demokrasi itu sendiri, dia perlu untuk tujuan pencapaian

pembangunan. Istilahnya di pusat satuan tiga, artinya sudah sampai proyek-proyek. Sama seperti di level daerah. Semestinya tidak boleh sampai di situ. Itu wilayahnya birokrasi. Artinya jika proses politis sudah masuk ke satuan tiga akan mengacaukan sistem perencanaan yang sudah ada.

CAPACITY BUILDING



Peran birokrasi harus diperjelas

Ya artinya wilayah yang dilakukan DPRD harus dibatasi, diatur lagi. Bahwa birokrasi harus tidak boleh dicampuri sampai proyek-proyeknya oleh DPRD. Yang kedua persoalannya adalah masalah waktu perencanaan dengan penganggaran itu sendiri tidak pas. Kita merencanakan dengan anggaran yang kita miliki itu tidak pernah ketemu. Kalau orang hanya di ajak berpikir kebutuhan tetapi limitasi anggaran tidak jelas akhirnya orang sulit menentukan apa yang dilakukan terlebih dahulu. Jika anggarannya jelas maka kita bisa menentukan prioritas. Kalau tidak biasanya masukkan saja rencananya toh nanti ada yang memotong di level birokrasi, itu yang jadi sulit.

Peran Pusbindiklatren Bappenas dalam usaha peningkatan *capacity building*

Kepentingan untuk memperbaiki kapasitas tetap penting. Dalam artian kapasitas perencana itu sendiri harus terus berkembang. Ketika bicara demokratisasi, dulu orang berbicara apa yang dilakukan pemerintah tahun lalu bisa jadi pegangan terus untuk perencanaan tahun berikutnya. Namun ketika kita bicara masyarakat yang sudah sensitif seiring kemajuan teknologi informasi bisa berjalan cepat, tuntutan seperti itu tidak bisa menunggu perencanaan tahun depan, menurut saya ini konyol ketika perencanaan ini menjadi pegangan seperti kitab suci yang tidak bisa berubah sementara tuntutan masyarakat sangat cepat. Sehingga di tengah jalan perencana-perencana ini harus paham apa yang di butuhkan masyarakat yang

perkembangannya sangat cepat, dan itu harus direspon walupun kebutuhan tersebut tidak dimaksudkan di perencanaan pada awal tahun.

Namun dalam perkembangannya harus direspon menjadi kebijakan-kebijakan yang riil. Jika berpikinya tidak bisa dimasukkan karena tidak dimasukkan pada kebijakan sebelumnya maka makna birokrasi sebagai agen pembangunan tidak ada artinya. Seperti robot saja menungu anggaran berikutnya dan berikutnya lagi. Walaupun secara sistem anggaran sulit dilakukan tapi inilah yang harus dipikirkan kedepannya.

Saya pikir mekanisme yang kita buat bisa macam-macam, artinya diklat-diklat yang sudah ada bisa tetap dilaksanakan. Namun kita harus membuka wawasan bahwa ada dunia lain di luar birokrasi. Kalau saya bayangkan kalau seseorang bekerja di dinas perdagangan, dia nantinya harus bekerja dengan para pengusaha. Nantinya dia diklatnya bisa magang di perusahaan-perusahaan besar sehingga mengerti apa yang dibutuhkan. Atau jika dari dinas sosial bisa magang di lembaga-lembaga sosial internasional seperti UNDP. Menurut saya ini penting yang selama ini birokrasi ya cuma birokrasi, padahal nilai-nilai yang dikembangkan oleh NGO jauh lebih cepat berkembang. Saya pikir magang-magang seperti ini jauh lebih bermanfaat. Kalau dalam sistem kepegawaian saya membayangkan "position base" itu juga penting. Artinya orang menduduki suatu jabatan bukan karena karir dan golongan saja tapi orang dari luar/swasta masuk langsung eselon II, sehingga dengan nilai-nilai baru bisa mengembangkannya di dalam pemerintahan. Ketika seseorang sudah PNS bisa berkesempatan bekerja di sektor swasta misalkan 2 tahun kemudian bisa kembali lagi ke pemerintah. Nah kalau kita di pemerintahan kan untuk naik harus rotasi berkali-kali namun masih di internal birokrasi. Kalau di negara maju keluar masuk dari pegawai negeri ke swasta sudah biasa terjadi. Sehingga kulturnya jauh lebih bagus. Kita selalu berpikir aturannya yang tidak ada. ya kita tinggal buat saja aturannya.

Bagaimana sustainable penempatan pasca diklat?

Itu yang jadi persoalan, bukan hanya pegawai setelah mendapat diklat tapi ketika masuk pegawai negeri baru sudah jelas formasinya. Namun ketika kepala daerahnya ingin menggeser ya tinggal geser saja. Artinya peran institusi kepegawaian di daerah sangat menentukan. Siapa sebetulnya yang boleh menggeser-geser tersebut apakah otoritas politik seperti sekarang ini. Kemudian bisa diatur misalkan seseorang yang menduduki jabatan jika tidak memiliki kesalahan minimal 2 tahun tidak bisa dirotasi seenaknya. Sekarang ini otoritas masih di tangan kepala daerah, RPJMD itu bukan hanya pemerintah, pemerintah hanya sebagian kecil dari keseluruhan sistem. Dimana peran swasta disitu yang belum terbaca. Bagaimana mengintegrasikan hal tersebut yang harus kita diskusikan. Ini hanya terkait APBD. kalau di gambarkan apakah pemerintah sejajar dengan swasta, *civil society*, atau dibawahnya. Artinya posisinya bagaimana, ini yang belum jelas. Saya melemparkan ini namun saya tidak bisa memberi jawaban. Artinya dalam RPJMD posisi swasta, *civil society* harus jelas. Walaupun secara proses sudah melibatkan itu, tetapi angka-angka capaian juga konsekuensinya bagaimana dalam program? terkait program SKPD.

Saran terhadap Pusbindiklatren Bappenas terkait peningkatan *capacity building* perencana di daerah

Menurut saya sekarang ini masih terlalu serius pada Diklat nya saja tapi di daerah mau dijadikan apa yang kita tidak tahu. Artinya pasca Diklat jangan tutup mata, apakah di daerah benar-benar termanfaatkan. Ini yang tak pernah terkontrol. Sistem diklatnya sendiri porsinya masih terlalu banyak "*In Class*", walaupun akhirnya kita harus kreatif mengajak melihat praktek-praktek itu.

*) **Ketua Pengelola Magister Administrasi Publik (MAP), Universitas Gadjah Mada**

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN NASIONAL DITENTUKAN OLEH OPTIMALISASI SELURUH SUMBER DAYA YANG ADA

Oleh : Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D *)



“ Proses perencanaan pembangunan ke depan harus menyangkut pembahasan seluruh sumber daya yang ada, sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sistem pengendalian dan evaluasi yang terintegrasi ”

Proses perencanaan pembangunan menyangkut serangkaian proses konsultasi, koordinasi, komunikasi, musyawarah dan pengambilan keputusan untuk menetapkan prioritas dalam pengelolaan sumber daya. Proses tersebut tidak hanya melibatkan seluruh kementerian/lembaga, tapi juga pemerintah daerah mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai provinsi.

Kunci keberhasilan dalam mengelola proses perencanaan pembangunan antara lain adalah (1) ketersediaan sistem data dan informasi tentang prioritas pembangunan dan pagu anggaran, (2) kelancaran arus informasi baik dari pusat ke daerah maupun dari daerah ke pusat, (3) ketersediaan panduan, kriteria, tata kerja dan hasil analisis sebagai dasar penetapan prioritas pembangunan, (4) kekuatan jaringan komunikasi antarlembaga, serta (5) kemitraan dan kerjasama kelompok kerja dalam menjaga seluruh rangkaian proses perencanaan pembangunan.

Beberapa catatan positif dalam mengelola proses perencanaan khususnya mengawal pelaksanaan

musyawarah perencanaan pembangunan antara lain. *Pertama*, beberapa kementerian/lembaga telah mencoba merumuskan program dan kegiatan yang disertai dengan lokasi. Perubahan ini akan memberikan kejelasan dan kepastian bagi pemerintah daerah pada saat diskusi dan pembahasan penentuan prioritas lokasi program dan kegiatan. *Kedua*, beberapa pemerintah provinsi telah menyusun usulan kegiatan berdasarkan prioritas utama, bukan lagi *shopping list*. Perubahan ini memberikan kejelasan bagi kementerian/lembaga dalam mengalokasikan anggaran. *Ketiga*, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah semakin menyadari pentingnya koordinasi dan sinergi dalam perencanaan pembangunan.

Sementara, catatan yang perlu diperbaiki dari proses perencanaan pembangunan antara lain adalah, *pertama*, proses perencanaan masih terbatas pada pembahasan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, belum mencakup pembahasan tentang dana perimbangan, investasi swasta dan alokasi kredit perbankan.

Keberhasilan pembangunan nasional dan daerah sangat ditentukan oleh optimalisasi seluruh sumber daya yang ada. Oleh sebab itu, proses perencanaan pembangunan ke depan harus menyangkut pembahasan seluruh sumber daya yang ada. *Kedua*, sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sistem pengendalian dan evaluasi masih belum terintegrasi. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidaksinambungan (*missing link*) antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi. *Ketiga*, penetapan prioritas program dan kegiatan K/L yang akan dilaksanakan di setiap provinsi belum menggunakan kriteria yang jelas dan analisis dampak yang mendalam dan lengkap. Faktor penyebabnya adalah terbatasnya data dasar dan informasi tentang permasalahan dan potensi daerah, lemahnya kemampuan melakukan analisis dalam menetapkan kriteria dan prioritas, dan lemahnya pemahaman tentang dampak suatu kebijakan, program dan kegiatan. Sebagai akibatnya penentuan prioritas program dan kegiatan tidak sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah. *Keempat*, prioritas yang diusulkan oleh pemerintah daerah belum didasarkan pada kriteria yang jelas dan analisis kebutuhan secara lengkap dan mendalam. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas dan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam menyusun prioritas pembangunan. *Kelima*, proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah tidak sepenuhnya sinkron dengan proses pengambilan politik yang dilakukan oleh parlemen. Hal ini menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan khususnya keterlambatan penetapan alokasi dana perimbangan berdampak pada keterlambatan pelaksanaan di berbagai daerah. Kondisi ini mengakibatkan kinerja pembangunan menjadi rendah.

Berbagai permasalahan tersebut perlu diatasi dengan meningkatkan kapasitas para perencana baik dari kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas yang diperlukan menyangkut beberapa hal antara lain: (1) teknik

dan analisa kebijakan publik termasuk pemahaman sistem perencanaan pembangunan, (2) teknik dan analisa ekonomi dan pembiayaan pembangunan, (3) sistem informasi dan manajemen pembangunan, (4) sistem dan teknik komunikasi publik, (5) teknik dan analisa dampak suatu peraturan perundang-undangan (*regulatory impact assesment*), (6) teknik dan analisa bidang yang bersifat khusus seperti analisa dampak lingkungan, analisa dampak sosial, analisa kelembagaan, analisa pemangku kepentingan dan lainnya.

Dengan memperhatikan berbagai kebutuhan peningkatan kapasitas tersebut, maka program pendidikan dan pelatihan substantif yang diselenggarakan oleh Bappenas perlu didesain ulang sehingga mampu menjawab permasalahan dan mendorong proses perencanaan pembangunan menjadi lebih baik, akurat, tepat dan maju. Hal ini sesuai dengan misi Bappenas dalam mengembangkan perencanaan pembangunan secara lebih profesional.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mengelola dan melaksanakan seluruh program pendidikan dan pelatihan substansif secara lebih baik dan profesional terutama dalam menentukan kurikulum, memilih penyelenggara atau pelaksana pelatihan, memilih pengajar yang berkompeten dan berkualitas, dan memberikan penghargaan kepada pengajar, menerapkan studi dan praktik lapangan, dan memantau hasil pelatihan.

*) **Penulis adalah Kepala Sub Direktorat Analisa Sosial dan Ekonomi Regional, Direktorat Pengembangan Wilayah Kedeputian Regional Bappenas**

DESENTRALISASI DAN OTONOMI UNTUK KESEJAHTERAAN

Oleh : Dr. Ir. Budhi Santoso, MA *)



“ Pembangunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir belum bisa dilihat kemajuannya secara signifikan dikarenakan pemerintah daerah yang masih tergantung kepada pemerintah pusat, maka peran Bappenas untuk menyadarkan masyarakat daerah, bahwa di era otonomi daerah mereka harus melakukan perencanaan yang bersinergi dengan pemerintah pusat. ”

Cakrawala

Reformasi yang sudah berjalan selama hampir 13 tahun masih meninggalkan kemiskinan di daerah yang tinggi. Otonomi dan desentralisasi sebagai salah satu cara dan kesepakatan hasil reformasi yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan belum mampu menurunkan angka kemiskinan di berbagai daerah. Angka kemiskinan masih berkisar di angka 13% bahkan di beberapa daerah ada yang mencapai 17%. Kemiskinan merupakan masalah dan tantangan utama yang harus di selesaikan dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Salah satu tujuan pokok desentralisasi dan otonomi daerah yaitu mensejahterakan masyarakat di daerah, oleh karena itu pemerintah daerah harus diberi kapasitas dan penguatan sehingga mampu membawa tugas pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat di daerahnya. Kita dapat melihat apakah kesejahteraan tercapai atau tidak dengan indikatornya adalah jika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi (masalah sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan). Setelah berjalan lebih dari 10 tahun banyak daerah belum dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Berbagai kendala dan hambatan menjadi faktor dalam pelaksanaan otonomi dan desentralisasi. Salah satu kendalanya utamanya adalah lemahnya kapasitas aparat daerah dalam mengemban misi otonomi dan desentralisasi. Apabila otonomi dan desentralisasi dapat berjalan dengan baik dan di

daerah tercipta kesejahteraan masyarakatnya maka salah satu tujuan pembangunan dapat tercapai yaitu pengurangan atau pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian maka diperlukan usaha-usaha yang komprehensif untuk mendukung pelaksanaan otonomi dan desentralisasi. Peningkatan kapasitas aparat merupakan salah satu pemecahan masalah dalam mengatasi kendala desentralisasi dan otonomi. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelaksana desentralisasi dan otonomi, khususnya bagi aparat pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan kapasitas dapat dimulai dengan memperkuat aparat pemda dari sisi perencanaan pembangunan. Sisi perencanaan ini memegang peran strategis karena merupakan awal dari seluruh rangkaian pembangunan. Dengan demikian aparat perencana pembangunan di daerah harus memiliki kemampuan yang memadai. Kelemahan dalam sisi perencanaan akan berdampak luas dalam seluruh pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian penyelesaian masalah pembangunan dapat dikatakan dimulai dari perencanaannya. Masalah kemiskinan, misalnya, kita dapat memulai merencanakan mengatasi masalah kemiskinan dengan merencanakan program pembangunan pengentasan kemiskinan sesuai dengan potensi dan karakter lokal di masing-masing daerah.

Secara nasional, untuk perencanaan pembangunan di tingkat pusat dapat dikatakan jauh lebih baik dan memadai dalam rangka perencanaan pembangunan. Hal ini dapat kita lihat dari hasil perencanaan pembangunan dalam skala nasional, misalnya melalui dokumen RPJM. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor di antaranya kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia aparatur perencana lebih baik di banding daerah.

Hal lain yang menjadi kendala dalam segi perencanaan adalah tidak semua pemda memahami siklus dan konsep perencanaan pembangunan di pusat. Disamping itu konsep, siklus dan metode perencanaan di pusat yang sudah berjalan dengan

baik belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di daerah. Hal ini berdampak pada sinergi dan integrasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah tidak terjadi.

Kendala lain adalah adanya kesenjangan kapasitas antara pusat dan daerah dalam pengelolaan perpindahan kewenangan dari pusat ke daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan dalam bidang keuangan yang bersumber dari APBN dan lainnya. Perjalanan selama 11 tahun belum mampu mengejar dan menutupi kesenjangan tercipta selama masa sentralisasi.

Desentralisasi kewenangan dari pusat ke daerah terjadi diberbagai bidang dan sektor pemerintahan. Bidang politik, administrasi, ekonomi dan keuangan (fiskal) adalah hal-hal yang sudah di desentralisasikan. *Desentralisasi bidang politik* dengan ciri pemilihan umum secara langsung untuk kepada daerah (PEMILUKADA) dilaksanakan sampai level pemilihan kepada daerah di tingkat Kabupaten/kota. Beberapa pendapat dan alasan pelaksanaan desentralisasi di tingkat kabupaten ini adalah untuk mencegah terjadinya niat dan keinginan pemisahan daerah dan mengantisipasi munculnya "raja-raja kecil" di Provinsi. Meskipun dalam perspektif ilmiah dan pelayanan publik desentralisasi di tingkat kabupaten/kota akan semakin mendekatkan pelayanan publik dan mendekatkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat karena pelayanan semakin dekat, cepat dan efisien. Dampak ikutan dari desentralisasi di level kabupaten/kota saat ini tidak saja membawa dampak positif sebagaimana yang diharapkan, namun juga membawa dampak negatif yaitu munculnya "raja-raja kecil" di tingkat kabupaten/kota. Untuk mengatasi dan mencegah dampak negatif ini diperlukan perbaikan secara terus menerus secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan daerah dan tentu saja ini memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit.

Yang kedua desentralisasi fiskal, penerimaan dana APBD dari pusat baik itu melalui DAU, DAK dan Dana Perbantuan, bagi beberapa daerah hal ini

menjadikan pengelolaan keuangan yang sangat besar. Dari total dana APBN yang di serahkan langsung pengelolaannya ke daerah ada sekitar 2/3 APBN. Transfer dana dan kewenangan pengelolaan oleh daerah dilakukan langsung dan ini menyebabkan beberapa daerah "tidak siap" menerima tugas pengelolaan ini. *Ketiga desentralisasi bidang administrasi*, pelaksanaan kewenangan administrasi oleh daerah yang selama ini dilakukan di pusat, masih menjadi kendala yang besar karena masih besarnya gap kapasitas antara aparat pusat dan daerah. Disamping kelemahan dan rendahnya kapasitas aparat daerah, sistem pengelolaan administrasi daerah membutuhkan perbaikan yang mendesak.

Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa selama kurun waktu 10 tahun terakhir pemerintah daerah yang masih tergantung kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini, Bappenas sebagai lembaga perencana pembangunan di pusat seharusnya berperan dalam meningkatkan kapasitas dan kesadaran daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan di mana mereka diharapkan sudah dapat bersinergi dengan pemerintah pusat.

Selama ini sinergi yang diharapkan belum terwujud sebagaimana diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dan hambatan yang ada dilapangan. Tiga (3) faktor penghambat utama yang menyebabkan sinergi tidak terwujud adalah : (1) Pemerintah pusat belum siap atau rela mendelegasikan kewenangan secara penuh kepada daerah, (2) pemerintah daerah belum siap menerapkan desentralisasi otonomi daerah dan (3) sistem yang ada belum siap. Menyikapi hal ini masih diperlukan revisi baik dalam konsep, metode dan sistimnya, misalkan konsep dalam hal pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.

Dalam menanggapi hal ini, Bappenas sebaiknya membuat peta jalan (*roadmap*) atau program untuk meninjau kembali pengalaman selama 10 tahun yang telah berjalan. Dari peta jalan tersebut kemudian dapat disusun perencanaan untuk 10-15 tahun yang akan datang guna mempercepat

pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu usaha perbaikan untuk mempercepat proses pelaksanaan otonomi dan desentralisasi yang sesuai adalah dengan meningkatkan kapasitas aparatur daerah. Peningkatan kapasitas SDM diharapkan akan berkorelasi positif terhadap sinergi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

Pusbindiklatren Bappenas, sebagai satu lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan, peningkatan kapasitas para perencanaan pembangunan di Indonesia diharapkan dapat bekerjasama dengan Direktorat Otonomi Daerah Bappenas dalam penyelenggaraan program diklat yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan kapasitas SDM. Salah satunya adalah melalui

Diklat-diklat yang dilaksanakan secara kontinyu. Dengan program diklat yang jelas dan disertai proses pendampingan setidaknya selama 3 tahun diharapkan akan terjadi peningkatan kapasitas yang nyata.

Proses pendampingan pasca diklat diharapkan bisa menyelesaikan masalah perencanaan pembangunan. Dengan mengambil satu contoh perencanaan program pembangunan pengentasan kemiskinan akan dapat menjawab permasalahan pengentasan kemiskinan di suatu daerah.

Tujuan lain dari Diklat dan pendampingan, dalam jangka panjang akan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi aparatur daerah.



Dalam hal peserta diklat perlu dipertimbangkan sebaiknya peserta tidak hanya berasal dari PNS tapi juga untuk para pencari kerja yang sebenarnya mungkin kapasitas kemampuan yang lebih tinggi dan akan berguna bagi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi. Peserta non PNS ini dapat dilatih di Jakarta kemudian dikirim ke daerah untuk membantu daerah atau mendampingi daerah dalam

melakukan perencanaan pembangunan dengan segala kompleksitasnya.

Dampak Kurangnya Sinergi (Pengalaman Berkoordinasi Dengan Daerah)

Sinergi dapat diumpamakan sebagai pembuatan sebuah sepeda. Dalam sebuah sepeda terdapat roda, rantai, stang dan sadel. Dengan mengambil

lokasi pembuatan roda dan rantai di Jakarta (pusat), kemudian pembuatan sadel dilaksanakan di daerah dan gotri dibuat di tingkat provinsi ketika disinergikan dan disinkronkan untuk menjadi sepeda akan terbentuk sepeda yang utuh. Sepeda yang utuh itu sebagai hasil sinergi pembuatan dari pusat dan daerah dapat dipakai untuk mencapai tujuan dengan lebih cepat. Sebaliknya, apabila tidak ada sinergi, akan sulit menjadikan sepeda yang utuh dan akhirnya akan lambat mencapai tujuan

Contoh lain dalam rangka mewujudkan sinergi adalah dalam bidang Pendidikan. Kalau kita menginginkan keluaran Perguruan tinggi dengan kualitas yang bagus maka pelaksanaan untuk mencapai kualitas pendidikan dari SD sampai ke perguruan tinggi tidak diserahkan di pusat semua. Harus ada pembagian peran dengan daerah. Misalkan pelaksanaan pendidikan kebijakannya untuk level SD-SMP di serahkan ke Kabupaten, kemudian SMA diserahkan kepada Provinsi dan Perguruan Tinggi di tingkat nasional.

Pembagian kelas jalan dan tanggung jawab pembangunan dan pemeliharaannya merupakan contoh dalam sinergi pembangunan.

Dalam lingkup negara, contoh negara yang sudah dapat melakukan sinergi dalam pembangunan adalah RRC

Melihat situasi dan kondisi saat ini maka Direktorat Otonomi Daerah (Otda), Bappenas memiliki Program dalam rangka mendorong terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Program ini akan dilaksanakan dalam masa 5 tahun dengan tema **"Program Penguatan Peran Provinsi Gubernur untuk Mengkoordinasikan Perencanaan di Wilayahnya"**. Program ini diharapkan dapat mewujudkan sinergi pembangunan antar kabupaten/kota dan antara kabupaten/kota dan propinsi.

Kondisi aktual saat ini, masih banyak pembangunan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi belum sinergi, dengan demikian maka peran provinsi perlu diperkuat agar dapat mengupayakan terciptanya

sinergi, di antara kabupaten/kota di provinsinya. Program ini dimaksudkan untuk menguatkan peran Gubernur dalam melakukan pengawalan terhadap sinergi pembangunan di propinsinya. Kewenangan ini juga terkait dengan masalah kemampuan dalam membuat regulasi, khususnya bagaimana daerah memahami, mengantisipasi dan mengusahakan undang-undang yang terkait dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Intinya adalah mengkoordinasikan perencanaan dalam kerangka satu kesatuan provinsi dengan cara pembagian dan penguatan peran. Dengan adanya program penguatan provinsi, maka peran Bappenas akan menjadi lebih mudah, Bappenas cukup berkoordinasi di tingkat provinsi dalam perencanaan pembangunan, sehingga terjadi pembagian peran perencanaan pembangunan baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

Peran Bappenas memberikan penguatan di tingkat provinsi, sehingga provinsi dapat memberi arahan *bottom up* kepada pemerintah pusat atau KL untuk menyampaikan program yang penting di daerahnya. Dengan demikian maka semua rencana kabupaten/kota dapat di "wakilkan" atau bersama-sama dengan provinsi, dan hal ini dapat memotong sistem birokrasi dimana kabupaten tidak maju sendiri ke pusat tanpa berkoordinasi dengan provinsi terlebih dahulu.

Sedang program yang kedua, Otda berharap adanya kerjasama dengan Pusbindiklatren dalam hal *capacity building* terutama di tingkat koordinasi provinsi. Penguatan kapasitas melalui *training* harus direncanakan secara benar dan azas manfaat menjadi pertimbangan. Diklat dilaksanakan dengan tujuan dan kepentingan khusus dan spesifik sesuai kebutuhan dan prasyarat tertentu bagi pesertanya. Diklat diarahkan untuk memberi manfaat khusus untuk menguatkan peran provinsi. Sebagaimana contoh adalah *training* P3B (*Pro-poor Planning dan Budgeting*) yang dilaksanakan dalam kerangka koordinasi di tingkat provinsi.

Program lain adalah beberapa kegiatan dalam diklat tentang penyusunan RPJM, dalam diklat ini

juga diberikan materi program pengembangan kapasitas yang tidak hanya ditargetkan ke aparaturnya saja, tetapi juga sistem, peraturan perundangan dan kelembagaannya.

Untuk aparaturnya juga diperhatikan mengenai organisasinya. Otda juga sudah mendorong beberapa program misalnya program proyek *Sustainable Capacity Building for Decentralization* (SCBD) yang mendorong pemahaman mengenai Peraturan Presiden dan mengenai Pedoman Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemda.

Saat ini sedang digagas dan dibahas adanya 2 Perpres mengenai Pengembangan Kapasitas Pemda dan UU Aparatur sipil negara.

Satu hal lagi, isu *capacity building* adalah tentang materi dalam diklat dimana diusahakan 50 persen materi adalah training, 50 persen lagi adalah tentang pembenahan sistem, misalnya sistem perekrutan pegawai, penempatan pegawai dan lain sebagainya. Karena pembenahan sistem tidak kalah pentingnya dengan aspek lainnya.

Peran dan fungsi Pusbindiklatren seyogyanya tidak hanya berperan selayaknya *event organizer* yang hanya melaksanakan *training*. Tetapi Pusbindiklatren sebaiknya harus dapat memberikan inovasi kepada *trainer* agar menggunakan pendekatan yang lebih terpadu. Bagaimana sistem atau perencanaan dan kelembagaan di daerah. Jadi ada proses analisa evaluasi situasi dari daerah (dalam masing-masing provinsi) agar sinergi dapat berjalan. Jadi pendekatannya harus terpadu dan cocok dengan daerah tersebut. Sehingga pendekatan di Jawa harus berbeda dengan di Papua.

Diharapkan Pusbindiklatren dapat memberi dorongan dan inovasi yang spesifik kepada masing-masing daerah khususnya tentang bagaimana sinergi pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi daerah masing-masing. Sinergi tersebut tidak hanya berupa *training*, tapi juga fokus pendekatan tidak hanya kepada manusianya tetapi juga kepada sistemnya. Jadi harus ada proses pendampingan setelah *training*.

Bappenas dalam beberapa waktu yang lalu mempunyai peran yang besar di bidang program pengentasan kemiskinan. Saat ini Bappenas juga selayaknya berfokus pada peran yang besar, efektif dan efisien terhadap koordinasi perencanaan (yang tidak hanya dokumen) tetapi ada proses pengawasan, pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi. Hasil dari pengawasan dan evaluasi akan menjadi bahan masukan untuk perencanaan berikutnya. Inovasi ini dapat mengisi kekosongan yang diharapkan oleh daerah atas peran Bappenas.

Direktorat-direktorat sektor di Bappenas sebaiknya bukan menjadi wakil K/L, tetapi menjadi acuan dari K/L yang mempunyai peran supervisi. Jadi Bappenas harus memperbaiki diri dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya sebagaimana mestinya. Bappenas harus menjadi pionir dan pengarah dalam rangka sinergi dan koordinasi perencanaan pembangunan dan ikut mengawasi pelaksanaannya. Bappenas tidak boleh berperan sebagai *follower*.

Diharapkan kurikulum *training* yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren di masa depan dapat mengandung 3 hal, yaitu terkait dengan masalah aparaturnya, keuangan daerah dan kelembagaan pemerintah daerah. Dari sisi keuangan, bagaimana agar daerah dapat mandiri dalam hal keuangan daerahnya (tidak tergantung pada pusat) dengan menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan di daerah. Dari sisi kelembagaan diharapkan daerah dapat mempunyai sistem kelembagaan yang dapat melakukan koordinasi perencanaan di daerah sampai kepada implementasinya. Target dari semua penguatan ini adalah aparaturnya pelaksananya. Jika aparaturnya kuat dan memiliki kapasitas, maka mereka dapat mengatur keuangan daerah, dan mengelola kelembagaan daerah. Jika fondasinya adalah pendidikan (gelar), akan memakan waktu yang panjang. Pendekatan jangka pendek adalah melakukan pendekatan secara terpadu dan dilakukan pendampingan.

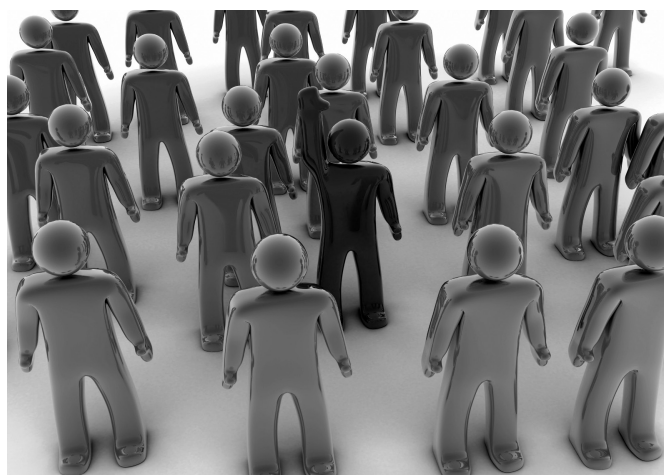
Agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan

daerah maka diklat yang diterapkan di Pulau Jawa tidak harus sama dengan diklat untuk wilayah Papua. Pusbindiklatren harus dapat memberikan pelatihan yang mendorong inovasi spesifik dan sesuai dengan daerah sehingga sinergi pembangunan bisa dilaksanakan di daerah. Tentu saja pelatihan harus dilakukan dengan analisa yang cocok. Pendekatan diklat tidak hanya manusia secara individu tapi juga sistemnya, kapasitasnya, kelebagaannya dan diberikan pendampingan pasca diklat (memonitor dan “menemani” kepada mereka dalam perencanaan pembangunan).

Bappenas pada waktu itu memberikan peran yang cukup besar dalam pengentasan kemiskinan pada awal pembangunan. Saya berharap Bappenas saat ini juga dapat fokus dalam hal tersebut, yaitu memberikan peran yang besar yang efektif dan efisien, terhadap donasi perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan tidak hanya sekedar berhenti pada hasil sebuah dokumen perencanaan pembangunan tetapi juga harus diikuti dengan proses pengawasan, pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi. Hal ini akan memberikan manfaat yang besar bagi masukan perencanaan pembangunan selanjutnya. Bappenas diharapkan mampu berperan untuk membantu pembangunan secara nasional, karena memang diharapkan oleh daerah Bappenas dapat untuk mengisi kekosongan. Peran tersebut tidak terlihat selama ini karena Bappenas berkesan menakutkan, oleh karena itu Pusbindiklatren bisa melaksanakan suatu disain program pendidikan untuk menuju ke arah peran tersebut dan Pusbindiklatren tidak terjebak pada peran dan fungsi sebuah “*Event Organizer*”.

Bappenas harus memperbaiki ke dalam Bappenas sendiri. Bappenas harus menjadi pionir/pengarah perencanaan pembangunan dan jangan hanya menjadi *follower* seperti sekarang ini.

Pusbindiklatren akan mendapat wawasan baru dalam mendisain diklat secara substantif bila bekerjasama dengan direktorat sektoral yang sesuai khususnya untuk mendisain kurikulum diklat. Kurikulum



yang akan didisain dengan metodologi yang baik termasuk metode proses pendampingan. Dalam membantu daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan otonomi ada tiga fokus terkait dengan masalah aparatur daerah, keuangan daerah dan kapasitas pemerintah daerah. Fokus tersebut adalah: (1) keuangan daerah, bagaimana daerah bisa mandiri dalam keuangan daerah, (2) segi kelembagaan, bagaimana system kelembagaan bisa melakukan koordinasi perencanaan pembangunan di daerah sampai implementasinya, (3) aparatur pemerintah daerah, target awal adalah aparatur daerah karena yang perlu diperkuat adalah aparatur untuk membuat fondasi melalui pendidikan untuk jangka panjang (S2 dan S3) dan untuk jangka pendek melakukan pendampingan dan pendekatan secara terpadu melalui *training-training*. Diharapkan dalam 5 tahun Pemda sudah bisa kuat, ini berdasarkan dengan pengalaman selama 10 tahun.

Dalam hal ini Direktorat Otonomi Daerah yang akan menangani substansi *capacity building*. Hasil *capacity building* beberapa kabupaten sudah bisa melakukan *e-planning* dan *e-manajemen*.

***) Direktur Otonomi Daerah Bappenas**

KOORDINASI DALAM BUAIAN

Istilah “koordinasi” seringkali sangat mudah diucapkan. Namun sangat sedikit dari kita yang mampu melaksanakannya, juga dengan sangat mudah. Tentu saja orang menyadari – ketika kata itu diucapkan – bahwa “koordinasi” adalah istilah yang keren, indah, sakti dan prestisius. Apalagi apabila diucapkan di depan forum para pejabat. Seolah-olah nampak sekali bahwa kita memiliki kekuasaan, jabatan atau kharisma untuk mengatakan kata sakti itu. Gagah. Bagian yang seringkali tidak disadari adalah : siapa, kapan, di mana dan bagaimana melaksanakannya? Tidak disadari bahwa pelaksanaan koordinasi itu pasti memerlukan orang lain. Kita sangat tergantung pada orang lain. Meski kita ketua, kepala, koordinator, atau pemimpinnya ya tetap saja kita akan memerlukan kerjasama dengan mitra kerja atau kolega, dan bantuan staf atau anak buah.

Istilah itu benar-benar indah karena – apabila ternyata mampu dilaksanakan – tujuannya memang baik dan benar. Coba saja misalnya : “agar terjadi sesuatu yang harmonis, sinkron dan sinergis” Duh, Alhamdulillah sesuatu banget deh. Istilah itu ternyata masih menjadi “slogan kamar”. Slogan hanya dituliskan pada spanduk di depan forum dan dicetuskan di dalam ruangan, lalu setelah forum ditutup dan orang-orang berada di luar ruangan, istilah itu kemudian menguap ke atas awan, hilang terbawa angin. Tanpa bekas. Lupa.

Di dalam konteks proses perencanaan pembangunan istilah koordinasi juga masih tidak berdaya dan kurang bermakna. Kelemahan koordinasi sampai saat ini masih menjadi masalah yang menonjol di dalam tata kelola birokrasi

Indonesia saat ini. Hal ini terjadi bukan hanya pada tahap perumusan kebijakan dan penyusunan rencana saja, tapi juga terjadi pada tahap pelaksanaan program dan kegiatan. Demikian pula pada tahap pemantauan dan evaluasi, ego-sektoral menjadi biang dari keengganan untuk berkoordinasi antar instansi. Dalam konteks perumusan kebijakan misalnya forum trilateral meeting antara Bappenas-Kementerian Keuangan-Kementerian Teknis masih menemui kendala untuk mengoptimalkannya. Di daerah kelemahan koordinasi diantara Bappeda-Biro Keuangan-Dinas/SKPD menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya pelaksanaan program dan kegiatan.

Sesuai dengan fungsinya, para pemangku jabatan fungsional perencanaan (JFP) di setiap instansi perencanaan pusat dan daerah, tentu saja dapat dioptimalkan untuk memberikan kontribusi kepada peningkatan kualitas pelaksanaan koordinasi tersebut. Apalagi koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan publik dan penyusunan rencana pembangunan. Namun, optimalisasi para pemangku JFP ini – kembali lagi – kuncinya adalah pemahaman para pimpinan terhadap kedudukan dan fungsi JFP di dalam organisasi pemerintah yang dipimpinya.

Saat ini para pemangku JFP yang tergabung di dalam Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) tengah membantu Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) dalam melakukan kajian tentang kedudukan dan mekanisme JFP di pusat dan di daerah. Kesimpulan sementara kajian ini adalah perlu adanya komunikasi efektif yang dapat memberikan pemahaman kepada para pejabat struktural di setiap instansi perencanaan. Setelah dengan provinsi Jawa Timur kemarin, juga dilakukan diskusi dengan para pejabat struktural di Kabupaten Wonosobo (22 November 2011) dan Kota Bitung (29 November 2011).

Semoga upaya AP2I dan Pusbindiklatren ini dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan, sehingga harapan agar dihasilkan rencana pembangunan yang sinkron, terintegrasi dan sinergis dapat diwujudkan. (Gsp).

JADWAL PELAKSANAAN DIKLAT NON GELAR 2012

Diklat Non Gelar	Jenis Diklat	Rencana Pelaksanaan	Lama Pelaksanaan
A. SUBSTANTIF			
	Diklat PPD Reguler	Minggu ke II s.d III Mei 2012	30 hari
	PPD-RPJMD	Minggu ke III s.d IV Mei 2012	14 hari
	LERD domestik	Minggu ke IV Mei s.d. Minggu I Juni 2012	14 hari
B. TOPICAL ISSUES			
	Diklat <i>Pro-Poor Planning and Budgeting</i> (P3B)	Minggu ke III s.d. IV Juni 2012	7 hari
	Diklat <i>Green Economy</i>	Minggu ke I s.d. II Juli 2012	14 hari
	Diklat Mitigasi Bencana	Minggu ke IIs.d.III September 2012	14 hari
	PPP-domestik	Minggu ke II s.d. III Juni 2012	14 hari



Rapat Koordinasi Program Gelar dan Non Gelar Pusbindiklatren Bappenas 2011 yang diselenggarakan di Universitas Andalas Pada 27 Desember 2011

A. Persyaratan Diklat Substantif

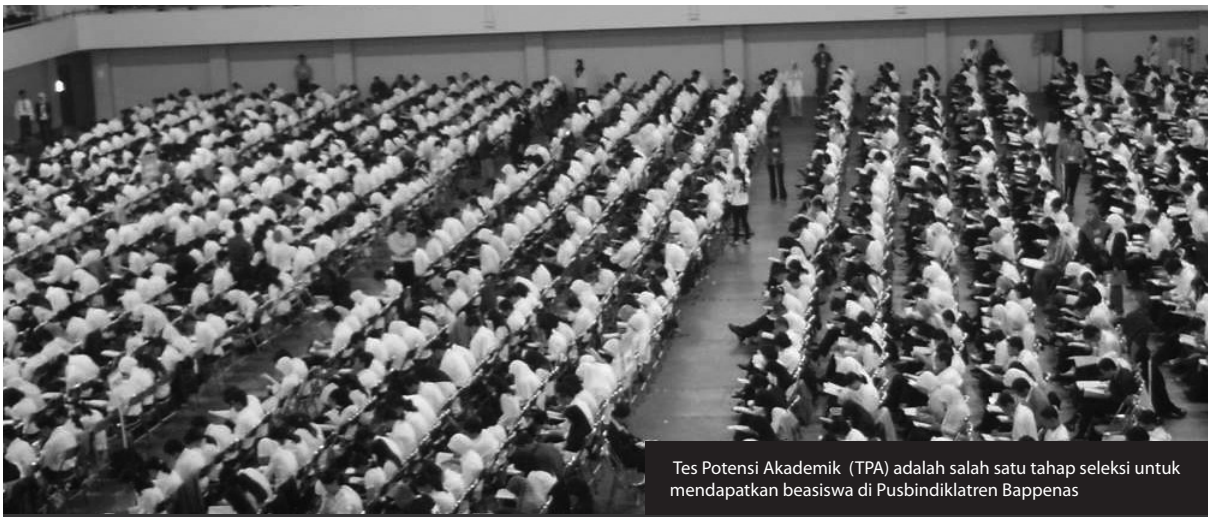
- PNS minimal 2 th /III A
- Staf Perencana/Struktural bidang Perencanaan/Fungsional Perencana
- Diusulkan minimal UKE II
- Pendidikan minimal DIV/S1

- Umur maksimal 50 tahun
- Mengisi Formulir Pendaftaran

B. Persyarat Diklat *Topical Issues*

- PNS minimal 2 th /III A
- Staf Perencana/Struktural bidang Perencanaan/Fungsional Perencana
 - Diusulkan minimal UKE II
 - Pendidikan minimal DIV/S1

 - Umur maksimal 50 tahun
 - Mengisi Formulir Pendaftaran



Tes Potensi Akademik (TPA) adalah salah satu tahap seleksi untuk mendapatkan beasiswa di Pusbindiklatren Bappenas

INFORMASI BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS (DIKLAT GELAR 2012)

Dalam menjalankan fungsi sebagai penyelenggara diklat, Pusbindiklatren menyediakan beasiswa Gelar dan Non Gelar yang bekerjasama dengan universitas di dalam dan luar negeri, untuk beasiswa Gelar program yang ditawarkan meliputi S3 Dalam Negeri, S2 Dalam Negeri, dan S2 *Linkage* yang terdiri atas *linkage* Jepang, *linkage* Belanda dan *linkage* Perancis, serta peningkatan bahasa.

Pembiayaan program beasiswa Pusbindiklatren ini bersumber dari APBN, hibah pemerintah asing/institusi penyedia beasiswa dalam dan luar negeri maupun dari pinjaman lunak JBIC melalui *Professional Human Resources Development Project* (PHRDP) III.

Ketentuan dan Kreteria Seleksi Beasiswa

1. Seleksi administrasi sebagai berikut:
 - (a). Bekerja pada instansi perencanaan, atau unit-unit perencanaan;
 - (b). Pada tanggal 1 Agustus tahun seleksi penempatan, berusia tidak melebihi 40 tahun ;
 - (c). Pada tanggal 1 Agustus tahun seleksi penempatan, telah memiliki masa kerja minimal 2 tahun pada golongan III/a dan pada gelar S1/

- S2 Terhitung Mulai Tanggal pengangkatan 100% PNS;
- (d). Khusus bagi para calon yang memilih program S2 *linkage* Perancis, pada tanggal 1 Agustus tahun seleksi penempatan, telah memiliki masa kerja minimal 1 tahun pada golongan III/a dan pada gelar S1 Terhitung Mulai Tanggal pengangkatan 100% PNS;
- (e). Berlatar belakang pendidikan S1 untuk melamar S2, atau S2 untuk melamar S3;
- (f). Telah lulus S1/S2 minimal 2 tahun;
- (g). Memiliki IPK minimum 2,50 untuk S2 dalam negeri, 2,75 untuk S2 *Linkage*/Peningkatan Bahasa Inggris, atau 3,25 untuk S3 dalam negeri dan S3 *Linkage*.
- (h). Belum memiliki gelar S2/S3 atau tidak sedang mengambil S2/S3, dan tidak sedang dalam proses pelamaran beasiswa lainnya.

Seleksi Tes Potensi Akademik (TPA)

Seleksi TPA dimaksudkan untuk mengukur potensi akademik seseorang guna menjaring calon penerima beasiswa yang mempunyai potensi keberhasilan akademik yang tinggi, jika calon tersebut diberi

kesempatan mengikuti pendidikan program S2 Dalam Negeri, S2 *Linkage*, S3 Dalam Negeri, serta untuk peningkatan bahasa

Kriteria Nilai TPA minimal bagi calon peserta untuk bisa dinyatakan lulus adalah: ≥ 500 untuk peserta yang berasal dari Pemda Luar Jawa; ≥ 525 untuk peserta instansi pusat yang bekerja di Luar Jawa; ≥ 525 untuk peserta yang berasal dari Pemda Pulau Jawa; ≥ 565 untuk peserta yang berasal dari Pemerintah Pusat; dan ≥ 565 untuk peserta S3 Dalam Negeri

Seleksi Bahasa Inggris (TOEFL)

Setelah ditentukan peserta-peserta yang lulus TPA, dilakukan tes kemampuan bahasa Inggris melalui TOEFL yang diselenggarakan kurang lebih satu bulan setelah tes TPA. Sama dengan kegiatan tes TPA, kegiatan ini akan dilakukan di daerah-daerah baik di ibukota propinsi maupun di ibukota kabupaten kota yang dipilih.

Kriteria nilai Institusional TOEFL minimal bagi calon peserta untuk bisa dinyatakan lulus adalah: ≥ 400 untuk program Beasiswa S2 Dalam Negeri; ≥ 450 untuk program Beasiswa S2 *Linkage* dan Peningkatan Bahasa Inggris; dan ≥ 500 untuk program S3 Dalam Negeri;

Peserta yang diundang seleksi bahasa (tes Institusional TOEFL) adalah: mereka yang memenuhi kriteria batas lulus TPA; mereka yang diusulkan oleh instansi asalnya dan telah mempunyai nilai TPA yang memenuhi kriteria batas lulus pada butir 2 di atas, yang masih dalam kurun waktu tidak lebih dari 2 tahun.

Seleksi Penempatan

Peserta yang memenuhi kriteria untuk ditempatkan adalah: mereka yang memenuhi kriteria batas lulus TPA dan TOEFL; mengisi lengkap formulir wawancara tertulis; akan ditempatkan pada universitas/program studi dengan menggunakan kriteria prioritas:

- (a). Prioritas pertama: Pemda Luar Jawa (perempuan kemudian laki-laki);
- (b). Prioritas kedua : Peserta instansi pusat yang bekerja di Luar Jawa (perempuan kemudian laki-laki);
- (c). Prioritas ketiga: Pemda Jawa (perempuan kemudian laki-laki);
- (d). Prioritas keempat: PNS pusat yang bekerja di luar Jawa (perempuan kemudian laki-laki)
- (e). Prioritas kelima PNS Pusat (perempuan kemudian laki-laki);
- (f). Diusahakan 60% Pemda Luar Jawa dan PNS pusat yang bekerja di luar Jawa, 30% Pemda Jawa, 10% Institusi/Unit Perencanaan Pusat.

Program Beasiswa Pusbindiklatren S2 dalam negeri

Program beasiswa ini dilaksanakan pada universitas di Indonesia yang telah bekerjasama dengan Pusbindiklatren, pada program ini peserta mendapatkan satu gelar. Universitas/program studi yang menyelenggarakan program ini adalah:

1. Universitas Syiah Kuala (termasuk kelas internasional)
Magister Ilmu Ekonomi Studi pembangunan
2. Universitas Andalas
Magister Perencanaan Pembangunan
3. Universitas Sriwijaya
Magister Administrasi Publik
4. Universitas Indonesia
Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi
Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
5. Institut Pertanian Bogor
Magister Studi Perencanaan Wilayah
6. Institut Teknologi Bandung
Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Magister Studi Pembangunan
7. Universitas Padjadjaran
Magister Ekonomi Perencanaan Pembangunan
Magister Ilmu Lingkungan
8. Universitas Gadjah Mada
Magister Perencanaan Kota dan Daerah

- Administrasi Publik
Magister Ekonomi Pembangunan
9. Universitas Diponegoro
Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Magister Ilmu Lingkungan
 10. Universitas Brawijaya
Magister Administrasi Publik
 11. Universitas Hasanudin
Magister Konsentrasi Studi Manajemen perencanaan

Program S2 Linkage

Program *Linkage* ini dilaksanakan Program S2 *Linkage* ini dirancang dengan kuliah tahun pertama dilaksanakan di Indonesia (di program studi universitas di Indonesia) sedangkan kuliah tahun ke dua dilaksanakan di universitas luar negeri, di akhir perkuliahan, peserta berhak mendapat dua gelar dari masing-masing universitas tersebut.

Universitas di Indonesia yang menyelenggarakan *Linkage* Belanda

1. MPKD Universitas Gadjah Mada,
2. Fak. Geografi Universitas Gadjah Mada,
3. MPWK Institut Teknologi Bandung,
4. PPIE Universitas Indonesia,
5. Program *Low Land Management* Universitas Sriwijaya.
6. Program MEPP Universitas Padjajaran

Universitas di Indonesia yang menyelenggarakan *Linkage* Belanda

1. Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada
2. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota,

- Institut Teknologi Bandung,
3. Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya
 4. Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia
 5. Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada.
 6. Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Padjajaran.

Universitas di Indonesia yang menyelenggarakan *Linkage* Perancis adalah MPWK Universitas Diponegoro

S3 Dalam Negeri

S3 dalam negeri akan diselenggarakan oleh universitas: Undip, ITB, Unpad, IPB, UGM, Brawijaya, dan UI

Program Peningkatan Bahasa

Program ini digunakan untuk peserta yang ingin melanjutkan kuliah di Luar Negeri, Pusbindiklatren hanya memberikan beasiswa untuk meningkatkan program bahasa Inggris di Indonesia selama 5,5 s/d 6 bulan.

Seleksi Beasiswa Gelombang II tahun 2012

Seleksi beasiswa gelombang II sudah di edarkan ke seluruh Instansi sasaran baik di pusat maupun di daerah. Seleksi ini untuk tahun anggaran 2012. Pendaftaran gelombang II ini di tutup tanggal 10 Pebruari 2012 cap pos, pelaksanaan TPA direncanakan pada tanggal 31 Maret 2012, sedangkan pelaksanaan TOEFL direncanakan pada tanggal 14 April 2012. **(Maslakah Murni)**

JADWAL KEGIATAN

KEGIATAN	S-2 DN, S-3 DN	S-2 Linkage	PENINGKATAN BAHASA
Surat Edaran	Minggu I Maret	Minggu I Maret	Minggu I Maret
Batas Pengajuan Usulan Peserta	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus
TPA Nasional	Minggu III Agustus	Minggu III Agustus	Minggu III Agustus
TOEFL Nasional	Minggu III September	Minggu III September	Minggu III September
EAP	Tidak ada	Minggu I April Tahun berikutnya	Minggu III Mei Tahun berikutnya



BEASISWA SPIRIT

Reformasi birokrasi di berbagai Kementerian/Lembaga di Pemerintah Pusat, sangat diperlukan untuk penyempurnaan dan penyesuaian manajemen dan critical mass dalam rentang serta tataran yang meliputi kebijakan, regulasi, tata kelola, penilaian, pembinaan, serta dukungan sumber daya yang kondusif

Scholarship Program for Strengthening the Reforming Institution

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerima bantuan World Bank melalui *Loan Agreement* IBRD No. 8010-IND yang ditandatangani pada tanggal 18 Maret 2011. Sehubungan dengan hal tersebut, diputuskan sebelas Kementerian/Lembaga (*Participating Agencies*) yang telah menjalankan prioritas nasional yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan sektor publik/ekonomi, pembiayaan manajemen SDM, peningkatan iklim investasi, pengelolaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ke sebelas Kementerian/Lembaga tersebut yaitu: (1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB); (2) Badan Kepegawaian Negara (BKN); (3) Lembaga Administrasi Negara (LAN); (4) Kementerian Keuangan; (5) Kementerian Perencanaan Pembangunan (Bappenas); (6) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); (7) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu); (8) Badan Pertanahan Nasional (BPN); (9) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); (10) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan (11) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam pengelolaannya program SPIRIT dikelola melalui dua *Project Implementation Unit* (PIU) yaitu Bappenas dan Kemenkeu.

RENCANA KEBERANGKATAN PIU BAPPENAS

JUMLAH PESERTA PER TAHUN		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1	Diklat Gelar								
	a. Luar Negeri	56	80	84	54	44	-	-	318
	b. Dalam Negeri	44	90	75	49	44	-	-	302
	b. <i>Linkage</i>	5	8	16	14	6	-	-	49
Subtotal (Gelar)		105	178	175	117	94	-	-	669
2	Diklat Non Gelar								
	a. Luar Negeri	145	224	217	190	140	87	-	1.003
	b. Dalam Negeri	121	106	151	108	94	84	-	664
		266	330	368	298	234	171	-	1.667
Subtotal (Non Gelar)		371	508	543	415	328	171	-	2.336
Total Jumlah Peserta Gelar + Non Gelar		397	579	614	476	389	171	-	2.626





Dr. Ir. Max Hasudungan Pohan, CES, MA

Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas

Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

KENAPA ADA KESENJANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH ?

Sesuai dengan amanat Kepala Bappenas /Menteri PPN, Bappenas perlu menanggapi isu kesenjangan kapasitas institusi perencanaan pusat dan daerah terutama dalam rangka meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergi antara institusi-institusi perencanaan serta menanggapi isu-isu mutakhir. Dalam rangka menanggapi isu tersebut, Pusbindiklatren bekerjasama dengan beberapa direktorat terkait di Bappenas sudah membuat desain baru diklat-diklat non-gelar yang dimaksudkan sebagai respon dari kondisi kesenjangan kapasitas Institutsi Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Majalah Simpul

Perencana Volume 17 berhasil mewawancarai

Dr. Ir. Max Hasudungan Pohan, CES, MA selaku

Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas Bidang

Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.

Berikut ini wawancaranya



Bagaimanakah kondisi kapasitas institusi perencanaan di pusat dan daerah secara umum? dan apa penyebabnya?

Sebelum menjawab pertanyaan itu, perlu saya sampaikan dahulu mengenai persoalan pentingnya perencanaan yang sudah menjadi kesadaran semua pihak, di segala lini kehidupan, bukan hanya di tingkat organisasi pemerintah dan swasta, baik nasional maupun daerah bahkan juga tingkat organisasi masyarakat dan individual. Ini menegaskan bahwa perencanaan adalah menjadi suatu keharusan "*planning is a must*".

Bila dikaitkan dengan kepentingan negara, dengan sumber daya kita yang terbatas, maka perlu pengaturan alokasi sumber daya itu secara tepat, nah ini yang menjadi tugas pemerintah. Jadi ini

soal kemampuan pemerintah, dalam hal ini institusi perencanaan, bukan hanya yang ada di Bappenas dan Bappeda, tetapi juga lembaga/KL di pusat dan SKPD lain di daerah dengan sumber daya manusia/perencana di dalamnya, menjadi bagian yang begitu penting.

Dalam hal ini, saya melihat ada tiga permasalahan yang terkait dengan kegiatan perencanaan pembangunan khususnya dan kegiatan pemerintah umumnya. Pertama, masalah "*learning organization*" yang tidak berjalan, terutama di daerah. Mobilitas pegawai daerah kita tinggi, seseorang yang dikirim untuk belajar perencanaan, baik yang dikirim belajar lewat sekolah formal ataupun yang sudah dibina/digodok dalam/bersama Bappenas, sebagai contoh, mestinya bisa berbakti kepada institusi perencanaan dahulu beberapa tahun agar ilmu perencanaan yang sudah dapat dilaksanakan untuk mengangkat kemampuan organisasi itu. Memang ini terkait dengan pengaturan pengembangan karir seseorang, yang menjadi hak daerah. Namun, seharusnya disadari bahwa orang yang menangani perencanaan bukanlah orang yang mudah diganti-ganti. Kegiatan perencanaan menuntut orang yang terlibat di dalamnya untuk mengendapkan ilmu dan pengalaman kerja yang cukup dalam dan luas. Kedua, terutama setelah masa reformasi, adanya kemunculan sifat primordialisme. Ini saya rasakan



Dr. Ir. Max Hasudungan Pohan, CES, MA
Saat di wawancarai Ir. Yahya Rachmana Hidayat,
MSc, P.hd (KaPusbindiklatren) di ruang kerjanya

sebagai suatu kemunduran/degradasi, sekarang populer dengan istilah “PAD = Putra Asli Daerah”. Ini cermin dari rasa nasionalisme yang luntur/ menyempit. Dahulu (sebelum reformasi), orang mulai menerima bahwa Kepala Dinas/Bappeda di Papua umpamanya, bisa dari Sumatera atau Sulawesi, begitu juga sebaliknya. Sekarang nampaknya ada pejabat yang harus disingkirkan, bukan karena ketak-mampuannya, tetapi hanya karena bukan berasal dari daerah setempat. Ini saya kira harus ditumbuhkan kembali kesadaran nasional terhadap kesatuan wilayah NKRI, dari hanya sekedar daerah se-asal.

Ketiga, kompetensi yang berkaitan dengan konsep perencanaan itu sendiri (*planning itself*). Terutama teman-teman perencana dari Indonesia Timur, di luar Sulawesi. Saya malah mengharapkan Pusbindiklatren-lah yang memiliki peta kompetensi perencana ini. Dan saya menyadari ini tugas yang berat. Saya memperkirakan untuk menjadi perencana yang mengerti permasalahan perencanaan secara komprehensif memerlukan paling sedikit tiga tahun, dan saya mengusulkan agar orang yang dibina/dilibatkan dalam ilmu perencanaan adalah orang-orang yang konsisten pengembangan karirnya di bidang perencanaan, jangan cepat-cepat dipindah ke bidang lain yang tak terkait dengan perencanaan.

Apa dampak adanya hal di atas, terhadap proses koordinasi dan sinergi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan proses perencanaan, khususnya perencanaan nasional?

Saya melihat ada sesuatu yang kurang nyambung antara kegiatan perencanaan pusat dengan perencanaan daerah. Saya kira perencanaan di pusat (dan perencanaannya) sudah kuat, sementara daerah masih lemah. Mungkin karena di daerah mobilitas perpindahan pegawai begitu tinggi, yang sangat dipengaruhi oleh semacam kepentingan politik dari kepala daerah yang juga berganti-ganti. Dalam istilah saya kemajuan kegiatan perencanaan daerah seperti “tarian poco-poco”, kadang kita melihat ada perkembangan yang baik dalam melakukan koordinasi perencanaan dengan kita, tapi tiba-tiba personil yang biasanya sudah paham terhadap proses koordinasi itu diganti dengan yang baru, dengan orang yang belum punya pengalaman dalam kegiatan perencanaan, jadi seakan-akan kita kembali lagi berkoordinasi dari posisi nol. Keadaan ini mengganggu pencapaian target nasional sebagaimana yang tercantum dalam RPJP dan RPJM.. baik nasional maupun daerah.

Mestinya dalam membangun kita menganggap RPJP sebagaia suatu “*building bricks*”. Kita tata sedemikian rupa agar sesuatu yang kita bangun mengikuti



pola yang kita mau bangun dalam suatu tahapan yang terkendali. Memang tidak bisa kita hindari adanya bias dalam pembangunan karena adanya kepentingan politik. Program pembangunan yang bias itu jadi bersifat menyempit (*myopi*), karena mengejar target jangka pendek saja.

Dalam hal ini, kita harus berani untuk mengatakan bahwa program pembangunan yang kita lakukan haruslah berdasar pada RPJP dan RPJM yang telah kita susun/sepakati. Saya melihat bila ada program yang tidak sesuai tetapi tetap terus berjalan, berarti ada semacam 2 (dua) kesalahan: kesalahan pemilihan dan kesalahan pengawasan. Memang bagi Bappenas dua isu itu terlalu jauh untuk ditangani langsung. Tapi saya berpendapat bahwa Bappenas (dan Bappeda) harus menyadari bahwa fungsi mereka adalah sebagai pengawal dari RPJP dan RPJM. Karena bila hal itu tidak diperhatikan, maka kepentingan nasional/daerah lah yang menjadi taruhannya (*at stake*).

Terakhir Pak, kira-kira solusi *capacity building* apa yang perlu diupayakan untuk menanggulangi masalah tersebut?

Saya kira *capacity building* harus dilakukan oleh banyak lembaga –bukan dominasi satu lembaga saja—dengan cara yang terintegrasi/terpadu

(*in a concerted manner*). Secara garis besar saya berpendapat ada 2 (dua) kelompok pembinaan: Untuk pemerintah daerah, pembinaan umum oleh Kemendagri. Sedangkan, pembinaan teknis tetapkan Kementerian/LPNK terkait. Dalam hal ini saya melihat fungsi kanwil (yang dulu ada dan sekarang sudah dihapuskan ternyata sebetulnya masih diperlukan. Karena sangatlah tidak efisien, umpamanya dalam hal pekerjaan umum, alat berat yang jarang digunakan itu harus dimiliki atau dibuat pengadaannya oleh setiap provinsi, lebih efisien diatur/dikoordinir dalam suatu wilayah, kapan suatu alat dimobilisasi ke suatu daerah yang memerlukan.

Dalam lingkungan kami sendiri, pembinaan otonomi daerah (di bawah Direktorat Otonomi Daerah) mencakup 3 (tiga) bidang: pembinaan keuangan, kelembagaan dan aparatur. Kewenangan kami di Bappenas terbatas, kami hanya bisa mengupayakan pembinaan tiga bidang itu dalam suatu *pilot project*. Sebetulnya, kami ingin membuat kegiatan yang lebih besar, namun dengan segala keterbatasan yang ada mudah-mudahan usaha pembinaan kami dapat di perbesar dan ditularkan (reduplikasi) di daerah lainnya dalam skala yang lebih luas dengan baik.

(Simpul)



Drs. Wawan Hernawan, MA

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Prov. Jawa Barat



KOPERASI DAN UKM SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DAERAH

Keberadaan Dinas Koperasi dan UKM di daerah sebagai kepanjangan tangan Kementerian Koperasi harus menjadi ujung tombak dalam pengembangan koperasi dan UKM di daerah agar menjadi salah satu sektor penggerak perekonomian daerah. Sejauh mana Dinas Koperasi dan UKM dapat peran dan fungsinya di daerah dan apa masalah utamanya. Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat berbagi pengalaman.



Pada tahun anggaran berjalan sekarang ini, bisakah Bapak menyebutkan salah satu program dan lokasi kegiatan yang menggunakan dana APBN?

Dana yang kami terima dari APBN dalam bentuk dana dekonsentrasi sekitar Rp 6 milyar, beberapa di antaranya untuk belanja dan kegiatan rutin seperti promosi produk Jabar.

Dalam kegiatan perencanaan pembangunan, tentunya kantor Dinas yang Bapak pimpin ikut dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, bagaimana pendapat Bapak mengenai kegiatan penyusunan rencana tersebut bersama instansi pusat (Bappenas dan Kementerian Koperasi dan UMKM), dan daerah (Bappeda Provinsi dan Dinas sejenis Kabupaten/ Kota)?

Sebetulnya kita --sebagai pemerintah-- berusaha untuk "mendengarkan" dan "menangkap" aspirasi masyarakat agar --paling tidak-- 3 hal yang menjadi perhatian pokok dapat juga terpenuhi. Pertama, masalah efisiensi, kedua kebutuhan nyata masyarakat dan ketiga, meningkatnya kesejahteraan

masyarakat. Positifnya, dokumen perencanaan itu selalu kita bisa selesaikan bersama. Negatifnya, saya kira kita belum sepenuhnya menangkap dan menyediakan sesuatu yang menjadi kebutuhan nyata dan menyejahterakan masyarakat.

Menurut Bapak apa penyebab hal positif dan negatif itu?

Saya kira karena kita belum secara jelas membagi kewenangan masing-masing tingkatan instansi dalam kegiatan pembangunan. Dalam bidang Koperasi dan UMKM, kita belum punya NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) baku untuk kegiatan perencanan dan implementasi pembangunan. Mungkin kita bisa mencontoh kegiatan pembangunan jalan di PU (Pekerjaan Umum). Di sana sudah ada pembagian kategori jalan: jalan Negara oleh Pemerintah Pusat, Jalan Provinsi oleh Provinsi, begitu seterusnya. Mungkin dalam kegiatan Koperasi dan UMKM, saya mengusulkan agar kegiatan Kop dan UMKM yang melibatkan antar-provinsi jadi tanggungjawab Pusat; kegiatan yang melibatkan antar-kabupaten/kota jadi tanggungjawab provinsi, begitu seterusnya.

Jadi koordinasi tanggungjawabnya lebih jelas. Saya belum merasakan perencanaan kita berbasis wilayah, yang membedakan antara perencanaan wilayah satu dan lainnya berdasarkan optimalisasi potensi daerah masing-masing. Salah satu contoh, saya melihat masih ada daerah yang secara nasional rasanya potensinya tidak masuk prioritas produk unggulannya, umpamanya garam, tapi mendapat dana untuk pengembangan garam, khan sayang bila masih terjadi semacam ini.

Bila demikian, bagaimana dampak dari ketiadaan NSPK dan perencanaan berbasis wilayah itu bagi koordinasi dan sinergi penyusunan kegiatan perencanaan dan pembangunan nasional kita?

J: Menurut saya, program pembangunan yang kita lakukan kelihatannya seperti program-program “hit and run” saja. Terkesan perencanaannya memakai prinsip “asal jalan dulu, nanti bisa dikoreksi kemudian, di tengah jalan”. Sepertinya koordinasi dan sinergi masih memerlukan banyak perbaikan.

Selain itu, apakah Anda juga melibatkan partisipasi swasta dalam kegiatan Koperasi dan UMKM di wilayah Anda dan bisakah disebutkan salah satu contohnya?

Sebetulnya, hampir di setiap kegiatan kami di Koperasi dan UMKM, selalu melibatkan banyak partisipasi dari swasta, walaupun kami tidak dapat menyebutkan nominalnya secara spesifik,. Contohnya, kegiatan promosi produk daerah dan sertifikasi halal.

Promosi produk daerah di antaranya kami mengajak pengusaha Giant dan Carrefour untuk menyediakan semacam *outlet* khusus bagi produk-produk lokal di gerai-gerai mereka. Dalam kegiatan sertifikasi halal, kami bekerjasama dengan MUI bagi ubi dan domba dan boleh dikatakan ini menjadi salah satu kegiatan unggulan kami, karena pemda lain belum ada yang lebih maju dari kami.

Apa positif dan negatifnya partisipasi swasta dalam kegiatan Koperasi dan UMKM di tempat Anda?

Yang pertama harus diklarifikasi adalah bahwa kegiatan Koperasi dan UMKM berbeda. Koperasi berkaitan dengan kelembagaan sedangkan UMKM berkaitan dengan pembinaan kegiatan usaha rakyat. Dalam menyelenggarakan dua kegiatan itu, kami memperhatikan tiga (3) azas: Pertama, keterbukaan; Kedua, keadilan; dan ketiga, kepatuhan. Selain itu, kami juga menekankan penggunaan istilah atau bahasa yang mudah dimengerti masyarakat, tidak memakai istilah yang asing bagi mereka.

Dengan menggunakan azas-azas dan prinsip-prinsip yang sudah disebutkan sebelumnya di atas diharapkan kami dapat menjaga integritas sebagai PNS yang netral, yang tidak terjebak dalam konflik kepentingan, yang akan mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih luas, baik dalam pengelolaan dana pemerintah maupun dana partisipasi masyarakat.

Terakhir Pak, kira-kira solusi apa yang perlu diupayakan untuk meningkatkan pengembangan kapasitas (*capacity building*) dinas yang Anda pimpin ini?

Saya merasa ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan secara seimbang. Pertama, SDM atau manusianya; Kedua, organisasinya; Ketiga, produknya. Masalah pertama, terkait dengan pengembangan ilmu dan perilaku pelaksana. Kedua terkait dengan prosedur perizinan, sedangkan, ketiga terkait dengan sertifikasi semacam SNI atau ISO. Biasanya, yang diperhatikan hanya pertama saja, sedangkan yang lain diabaikan. Saya berharap ketiganya bisa diperhatikan secara seimbang dan simultan.

(Simpul)

SEMINAR NASIONAL REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT SUPPORT (REDS) TAHUN 2011



Seminar nasional REDS adalah untuk melihat dampak dari hasil pelatihan yang diselenggarakan 10 (sepuluh) bulan setelah pelatihan yang dilakukan selama 2 minggu di Indonesia dan 3 minggu di Belanda

Seminar Nasional *Regional Economic Development Support (REDS)* merupakan rangkaian terakhir dari pelatihan REDS yang telah diselenggarakan oleh Pusbindiklatren Bappenas pada tanggal 1 s.d 10 Nopember 2010 di MPKD-UGM bekerjasama dengan IHS, Erasmus, Roteterdam, Belanda, pada tanggal 11 Nopember 2010 s.d. 5 Desember 2010 dan 2). tanggal 1 s.d. 10 Nopember 2010 di P3LWI-ITB dengan Rug *University*, Groningen, Belanda pada tanggal 11 Nopember 2010 sampai 5 Desember 2010.

Seminar ini diselenggarakan 10 (sepuluh) bulan setelah pelatihan yang dilakukan selama 2 minggu di Indonesia dan 3 minggu di Belanda, adapun tujuan dari seminar nasional adalah untuk melihat dampak dari hasil pelatihan tersebut yang salah satunya yang diharapkan adalah setiap tim Reds membuat rencana baik jangka pendek, jangka menengah yang akan diimplementasikan dengan penyusunan *action plan* (rencana aksi) yang lebih nyata. Guna mengembangkan produk-produk unggulan peserta diklat Reds dengan rencana pembentukan

REDS *Facility*, yang pada akhirnya produk-produk unggulan tersebut dapat mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pembangunan khususnya dalam pengembangan ekonomi lokal.

Adapun tujuan diadakannya Seminar Nasional Reds ini adalah untuk memperoleh masukan, saran, dan kritikan yang membangun guna kesempurnaan penyusunan *action plan* (rencana aksi) yang telah dibuat oleh setiap tim dari Instansi Pusat seperti; Kantor Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Universitas, NESO, KADIN maupun stakeholder lainnya yang terkait dengan produk-produk unggulan peserta Diklat.

Sedangkan nilai penting yang menjadi fokus seminar nasional tersebut meliputi :

1. Reds merupakan program dari Pusbindiklatren Bappenas yang telah diselenggarakan dengan dukungan *Netherland Education Support Office* (NESO) sejak tahun 2003 s.d. tahun 2010;
2. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) harus

Para peserta Seminar Nasional REDS mempresentasikan hasil selama mengikuti Diklat REDS



memperhatikan 3 (tiga) fokus; 1). Dukungan dalam pengembangan iklim usaha, 2). dukungan yang berbasis ekonomi lokal, dan 3). Dukungan dalam proses pengembangan ekonomi lokal;

3. Dalam fase kedua RPJMN 2005-2025, salah satu visinya diamanatkan untuk meningkatkan daya saing perekonomian, termasuk peningkatan daya saing ekonomi lokal melalui penguatan keterkaitan antara pusat-pusat pertumbuhan. Salah satu strategi yang dipilih adalah pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM);
4. Beberapa penyebab rendahnya daya saing adalah tidak meratanya fasilitas ekonomi (sarana dan prasarana; sebagai contoh tingginya biaya transportasi), rendahnya kualitas SDM (sebagai contoh kurang dari 1 persen populasi yang mengenyam pendidikan tinggi sehingga produktivitas rendah dan struktur usaha kebanyakan padat karya), buruknya iklim usaha, fasilitas dunia yang

terbatas (institusi yang menyediakan informasi mengenai pasar, pemasaran, dan lain-lain, seperti *Business Development Services* (BDS), maka dibutuhkan pembentukan lembaga pendukung pengembangan ekonomi lokal.

Pelaksanaan Seminar Nasional REDS

Seminar Nasional RedS, diselenggarakan oleh Pusbindiklatren Bappenas pada hari Rabu, 12 Oktober 2011 bertempat di Ruang pertemuan Jasmine Lt. 6, Hotel Swissbell, Mangga dua, Jakarta. Adapun tema yang diangkat dalam seminar nasional RedS tahun ini adalah **“Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daeah melalui Pengembangan Jejaring Kerja antar Stakeholder”**.

Acara Seminar Nasional REDS diikuti kurang lebih 95 orang peserta yang terdiri dari pejabat-pejabat Kementerian PPN/Bappenas, seperti: Sesmeneg PPN/ Sestama Bappenas: Dr. Slamet Seno Adji, MA; Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kapusbindiklatren Bappenas: Ir. Yahya

Rachmana Hidayat, M.Sc, Ph.D; Direktur Perkotaan dan Perdesaan: Ir. Hayu Parasasti, MPS dan, Pejabat setingkat Eselon III dan IV serta Staf Pusbindiklatren Bappenas, dan Direktorat terkait;

Perwakilan dari Pemerintah Pusat seperti;

1. Kementerian Koordinator Perekonomian;
2. Kemeterian Koperasi dan UKM;
3. Kementerian Perdagangan;
4. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian;

Utusan dari Asosiasi di wakili oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN), sedangkan utusan dari Perguruan tinggi dihadiri oleh perwakilan dari P3LWI-ITB, MPKD-UGM, HIS, RUG, sedangkan dari pihak sponsor dihadiri oleh Dirketur NESO Indonesia, Mr. Mervin Bakker, dan perwakilan dari Kedutaan Belanda.

Sedangkan tim peserta Reds 2010 terdiri dari 6 daerah meliputi :

1. Kabupaten Poso, Sulawesi Selatan dengan produk unggulannya Kakao;
2. Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dengan produk unggulannya Kain Ikat Troso
3. Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dengan produk unggulannya Karet;
4. Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dengan produk unggulannya Ubi Jalar;
5. Kabupaten Kupang, NTT dengan produk unggulannya Sapi Potong;
6. Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dengan produk unggulannya Susu Etawa.

Hasil dari Seminar Nasional REDS

Kesimpulan Seminar Nasional REDS, sebagai berikut:

1. Tim Peserta Pelatihan REDS 2010, telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dengan telah berhasilnya menyusun strategi pengembangan produk lokalnya dengan mengimplementasi *action plan* (rencana aksi)

mulai dari rencana jangka pendek, menengah maupun panjang;

2. Dalam pelaksanaan Pengembangan Ekonomi lokal tim Reds sudah cukup baik dengan melibatkan pihak perguruan tinggi lokal dan kelompok masyarakat seperti LSM;
3. Pihak Kedutaan Belanda dan NESO diharapkan dapat melihat dampak pelatihan Reds yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kemajuan hasil yang positif seperti yang ditunjukkan oleh Kabupaten Jepara dan Kabupaten Banjar, sehingga tidak hanya mendukung penyelenggaraan pelatihan, namun dapat juga dengan membantu membuka akses pasar dari komoditas ke kawasan Eropa;
4. Harus adanya pendampingan dalam pelaksanaan *action plan* yang telah dibuat tim Reds, ini bisa dilakukan misalnya oleh Direktorat Perkotaan dan Perdesaan Bappenas;
5. Jangan menanamkan asumsi bahwa teknologi dapat menjadi solusi semua masalah;
6. Dalam membuat proses perencanaan dalam hal penyusunan *action plan* yang terpenting adalah proses negosiasi hingga ada kesepakatan dari semua stakeholder;
7. Tim Reds belum melakukan usaha atau usaha pengembangan inovatif dan kreatif dan hanya menunggu bantuan pemerintah pusat atau mitra pembangunan dari semua strageti PEL di daerah REDS;
8. Kedepan harus adanya pendirian REDS Center yang membantu menangani semua PEL dan pengembangan komoditas.

(Hari Nasiri)



TRAINING OF TRAINERS ON PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (TOT PPP) LINKAGE TRAINING PROGRAM KAMPUS UNIVERSITAS GADJAH MADA DAN UNIVERSITY OF MIYAZAKI, MIYAZAKI, JEPANG

Oleh: Drs. Edy Purwanto, MA *)

Pembangunan pada dasarnya tanggung jawab bersama, antara pemerintah dan berbagai komponen masyarakatnya, termasuk pengusaha swasta. Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, pembangunan hampir identik dengan pengalokasian dana pemerintah yang terbatas, dan semestinya pemerintah dapat mencari cara-cara yang kreatif dan inovatif untuk mengajak swasta dalam suatu kerjasama pendanaan pembangunan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Namun kenyataannya, sebagian besar aparat pemerintah masih belum memahami bidang-bidang apa saja yang dapat dikerjakasikan dengan swasta dan tatacaranya. Pemahaman aparat pemerintah yang lebih luas menjadi penting untuk

mendorong terciptanya kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) yang produktif dan menguntungkan masyarakat luas.

Dalam rangka memberi pemahaman kepada aparat pemerintah, khususnya aparat perencana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sebagai lembaga yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan kepada perencana di seluruh Indonesia, mengadakan beberapa pelatihan bagi para calon pengajar (*training of trainers*) tentang kerjasama pemerintah dan swasta (*public private partnership*), yang nantinya dipersiapkan untuk menyebarkan pemahaman KPS kepada para aparatur daerah yang lebih luas. Pelaksana pelatihan tahun 2011 ini adalah

Universitas Gadjah Mada (UGM) yang bermitra dengan Miyazaki University, Jepang (*linkage training*) dan diikuti oleh 25 peserta, yang terdiri dari pegawai pemerintah pusat dan daerah serta dosen perguruan tinggi negeri dari seluruh Indonesia, yang bermitra dengan Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren), Bappenas.

Seperti dua angkatan sebelumnya, pelatihan *TOT PPP Linkage* angkatan ketiga ini diadakan di dua (2) Negara: 2 minggu di Indonesia dan 2 minggu di Jepang. Di Indonesia, pelatihan diadakan di lingkungan UGM (Hotel Cakra Cemara), Yogyakarta (12 - 23 September 2011). Di Jepang, minggu pertama diadakan di Universitas Miyazaki (26 - 30 September 2011), dan minggu kedua (3 - 7 Oktober 2011), pelatihan diadakan di kompleks perkantoran Kota Funabashi (kawasan metropolitan Tokyo).

Selama di Indonesia, pelatihan *TOT PPP* ditekankan pada materi yang mencakup konsep, ilustrasi dan review kasus-kasus Kerjasama Pemerintah dan Swasta/KPS (nama lain dari PPP), yang terjadi di Indonesia.

Beberapa isu yang di-*share* (sebagai ganti istilah "diajarkan") dan kegiatan yang dilakukan di UGM adalah paparan mengenai:

- a. KPS di Indonesia dan mancanegara;
- b. Perundangan dan kelembagaan KPS;
- c. Posisi unit KPS dalam birokrasi pemerintah Indonesia;
- d. Siklus, analisis ekonomi dan finansial proyek KPS;
- e. Monitoring dan evaluasi KPS
- f. Pengalaman Pemkot Yogyakarta
- g. Pembentukan kelompok diskusi

Selama di Jepang, pelatihan dilakukan dengan diskusi di dalam kelas dan kunjungan lapangan. Bahan diskusi di dalam kelas adalah mengenai hal-hal pokok yang terkait dengan praktek kerjasama pemerintah dan swasta di Jepang, yang diberi nama *Private Finance Initiative* (PFI). PFI ini merupakan PPP gaya Jepang setelah orang Jepang belajar dari praktek/pengalaman PPP di Inggris. Kunjungan lapangan pada beberapa contoh proyek kemitraan

antara pemerintah dan swasta di Jepang, yakni di Provinsi Miyazaki dan Metropolitan Tokyo.

Issue yang *dishare* dan kegiatan yang dilakukan dalam kelas di Jepang adalah:

- a. Perbedaan antara PPP dan PFI
- b. Peranan konsultan dalam PFI
- c. Proses tender proyek PFI
- d. Proses penilaian PFI
- e. Monev PFI
- f. Manajemen limbah, sebagai salah satu contoh proyek PFI
- g. Pembiayaan proyek PFI
- h. Presentasi kelompok diskusi

Sedangkan kunjungan lapangan contoh Proyek PFI selama di Jepang adalah:

- a. Pengelolaan Sampah *Eco-Green Plaza*, Kota Miyazaki
- b. Ruko Stasiun Miyazaki
- c. Rest Area, Jalan Lintas Provinsi (*Highway*) Miyazaki
- d. Sekolah Menengah dan Panti Jompo Kota Ichikawa, Tokyo Metropolitan
- e. Rumah Sakit Tokyo Metropolitan
- f. Pengelolaan Sampah Kota Kanagawa, Tokyo Metropolitan;

Dari hasil diskusi kelas dan kunjungan lapangan tersebut, para peserta *TOT PPP* mempresentasikan pengamatan dan usulan *action plan* menjadi tiga (3) kelompok. Kelompok pertama tentang pembiayaan proyek KPS, kelompok kedua tentang kelembagaan KPS dan kelompok ketiga tentang manajemen proses KPS.

Diharapkan bahan *action plan* tiap kelompok tersebut dapat terus dijalankan dan dilaporkan secara berkesinambungan dalam suatu pertemuan lanjutan setelah peserta tiba kembali di Indonesia.

*) Penulis adalah Staf Pusbindiklatren Bappenas

PENYELENGGARAAN SOSIALISASI JFP DAN DIKLAT PERENCANAAN TAHUN 2011

Dalam melaksanakan fungsi Bappenas sebagai instansi pembina perencana dan sebagai penyelenggara diklat perencanaan, tugas utama Pusbindiklatren adalah meningkatkan kompetensi dan produktivitas serta profesionalitas perencana pemerintah di seluruh Indonesia, dalam rangka meningkatkan kapasitas instansi perencanaan pemerintah di pusat dan daerah. Kegiatan sosialisasi program peningkatan *Capacity Building* Pusbindiklatren dengan target sarannya adalah instansi perencana di Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten.

Tujuan dari Sosialisasi ini: (1) Menginformasikan kepada jajaran pemerintah daerah agar lebih mengenal mekanisme pelaksanaan dan jenis program *capacity building* yang ditawarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas melalui program diklat gelar dan non gelar, (2) Memberikan informasi yang lebih rinci kepada aparatur pemerintah daerah tentang bagaimana mekanisme pengajuan PNS yang akan diusulkan menjadi peserta beasiswa diklat gelar dan non gelar substantif yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren, (3) Menyampaikan informasi secara komprehensif terkait dengan ketentuan pelaksanaan Jabatan Fungsional perencana kepada para aparatur pemerintah daerah, (4) Membagikan bahan Informasi produk Pusbindiklatren berupa : poster, *leaflet*, surat penawaran beasiswa, *Compact Disk* berisi informasi, buku info beasiswa dan *booklet*, (5) Mengumpulkan masukan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan pelaksanaan pembinaan JFP



dan penyelenggaraan diklat perencanaan.

Guna terselenggaranya Sosialisasi ini, petugas Narasumber yang ditugaskan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi program diklat perencanaan adalah staf Pusbindiklatren yang kompeten untuk melaksanakan sosialisasi.

Biaya penyelenggaraan Sosialisasi yang ditanggung Pusbindiklatren ini antara lain : biaya perjalanan dinas narasumber, dan biaya konsumsi yang terdiri dari makanan ringan dan makan siang, sedangkan biaya yang ditanggung oleh instansi masing-masing pemda yaitu sewa ruang, *transport* lokal serta perjalanan dinas para peserta sosialisasi dari Kabupaten dan Kota.

Sosialisasi JFP dan Diklat Perencanaan tahun 2011 ini diselenggarakan dengan sistem penawaran kepada Bappeda/Sekda Provinsi

Para peserta yang hadir dalam sosialisasi terdiri dari Para Kepala Bappeda/BKD, calon pejabat fungsional perencana, pejabat fungsional perencana dan calon penerima beasiswa gelar dan non gelar se-Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara. Dengan sosialisasi JFP diharapkan kedepannya JFP tak hanya menjadi profesi biasa namun menjadi perencana yang profesional di bidangnya. **(Edy S)**

TRAINING OF TRAINER (TOT) DISASTER MITIGATION (MITIGASI BENCANA)



Setelah mengalami penundaan karena satu dan lain hal, akhirnya pada minggu ke 3 bulan Oktober, pelatihan Mitigasi Bencana terlaksana berkat kerja sama dengan Pusat Studi Bencana (PSBA), Universitas Gadjah Mada (UGM). Pelatihan berlangsung dari tanggal 17 – 26 Oktober di Yogyakarta dan dilanjutkan pada tanggal 29 Oktober s.d. 12 November 2011 di Ritsumeikan *University*, Kyoto.

Pelatihan Mitigasi Bencana adalah salah satu pelatihan *topical issues* yang menjadi focus perhatian BAPPENAS sejak tahun 2010. Pelatihan *topical issues* lainnya adalah: *Green Economy*, *Pro-Poor Planning and Budgeting* (P3B) dan *Public Private Partnership* (PPP).

Perkembangan konsep manajemen bencana menuju pengurangan risiko bencana menjadi penting karena kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera. Kondisi semacam itu selain membawa beberapa keunggulan, juga membuat Indonesia berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang mempertinggi frekuensi kemungkinan terjadinya bencana sehingga memerlukan penanganan yang tepat. Letak

geografis Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat berpotensi sekaligus rawan bencana, antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, badai dan letusan gunung api.

Karena hal-hal di atas, Pemerintah Indonesia merasa sudah saatnya mengubah paradigma penanggulangan bencana dari yang sifatnya reaktif menjadi atisipatif. Selama ini penanggulangan bencana dilakukan melalui tindakan penyelamatan masyarakat yang terkena bencana (evakuasi) dan penyelamatan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, serta perlindungan dan pengurusan pengungsian. Sementara itu, kegiatan penanggulangan yang berdimensi mitigasi dan kesiapsiagaan sebelum terjadi bencana belum mendapat perhatian dan tindak lanjut yang serius dengan pertimbangan potensi bencana yang dapat terjadi di masa mendatang. Penanganan masalah bencana masih menghadapi problem kebijakan sehingga selain penanganan yang lamban, kualitas penanganan juga kurang memperhatikan kondisi masyarakat yang terkena dampak buruk bencana. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan salah satu wujud pemenuhan hak asasi rakyat.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana harus menjadi bagian dalam proses pembangunan.

Pengelolaan kebencanaan mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penyelamatan pada saat terjadi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Urutan tersebut merupakan satu kesatuan kinerja yang beralur, dan, sambung–menyambung tersusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Penggeseran paradigm atau cara pandang terhadap masalah bencana di Indonesia, yaitu:

- Dari respon darurat ke manajemen resiko
- Perlindungan rakyat sebagai perwujudan kewajiban pemerintah berupa perlindungan sebagai hak azasi rakyat
- Dari tanggung jawab pemerintah menjadi urusan bersama masyarakat

Pergeseran paradigma dalam penanggulangan bencana terlihat dari upaya proaktif terencana, pengurangan risiko, desentralisasi, dan urusan bersama dengan masyarakat. Penanggulangan bencana yang coba diterapkan oleh pemerintah dan lembaga/instansi terkait serta lembaga swadaya masyarakat saat ini dikenal dengan istilah Pengurangan Resiko Bencana (PRB), yang berbasis pendekatan holistik/menyeluruh. Program tersebut bukan hanya menyentuh aspek teknis tetapi juga aspek sosial ekonomi dan budaya. Pendekatan ini dikembangkan atas dasar kenyataan bahwa masyarakat yang memiliki ketahanan ekonomi baik ternyata juga memiliki ketahanan terhadap bencana yang baik pula.

Pelatihan Mitigasi Bencana ini dirancang dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman dan penguasaan konsep dasar dan teori penanggulangan bencana
2. Meningkatkan kemampuan peserta untuk menilai risiko bencana serta penilaian evaluasi atau kerugian akibat bencana

3. Meningkatkan kemampuan pemangku kebijakan (*stakeholders*) untuk menyusun rencana aksi daerah dalam pengurangan risiko bencana di daerahnya

Para peserta juga dibekali dengan informasi dasar perencanaan mitigasi bencana sebagai landasan dalam penyusunan rencana aksi daerah dalam pengurangan risiko bencana sesuai dengan amanat UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peserta pelatihan terdiri berasal dari berbagai *stakeholder*, yaitu:

- para staf pengajar dari berbagai perguruan tinggi (UGM, UNSYIAH, LPEM-FEUI dan UNHAS);
- para PNS yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan (khusus yang berasal dari daerah yang sering dilanda bencana (Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Kab. Klaten, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Gorontalo);
- staf Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- PNS Pemerintah Pusat yang terlibat dalam penyusunan rencana (BAPPENAS, Kementerian Kehutanan).

(Zamilah Chairani)



Aku kini bertugas di KPUD Kota Yogyakarta

MENGALIR MENGIKUTI JALAN-NYA

Yurnelis *)

Sebelumnya, tidak pernah terlintas dalam benakku akan menghabiskan lebih banyak waktu di kota gudeg ketimbang di kampung halamanku sendiri. Pertama kali ke Jogja sekitar bulan Juni 1991, ketika itu usiaku masih 18 tahun. Apabila dihitung sampai sekarang maka aku sudah menetap di Kota Jogja lebih dari 20 tahun.

Aku yang terlahir dari keluarga sederhana di sebuah Kota kecil di Selatan Sumatera Utara, Padangsidimpuan, mendapat kesempatan masuk UGM jurusan Hubungan Internasional, Fisipol, lewat jalur PBUD (Penyaringan Bibit Unggul Daerah). Hanya bermodalkan tekad dan keikhlasan orang tua, aku yang masih belia berangkat ke Jogja menggunakan bis. Saat itu tiket pesawat masih barang mewah, apalagi buat keluargaku yang pas-pasan. Perjalanan menggunakan bis tersebut membutuhkan 4 hari 3 malam untuk sampai ke tempat tujuan. Belakangan baru aku sadari bahwa keputusan pergi kuliah menyeberang pulau tersebut ternyata keputusan yang telah merubah cara pandang dan kehidupanku selanjutnya.

Selesai S1, Aku diterima jadi PNS di Pemerintah Kota Yogyakarta sekaligus mempertemukanku dengan ayahnya anak-anak yang asli jogja. Pekerjaan dan jodoh telah membulatkan tekadku untuk tidak balik ke kota asalku. Menurutku dedikasi bisa dilakukan di mana saja, nilai terpenting adalah keberadaanku dapat memberi manfaat pada orang di sekitarku.

Usaha untuk mendapatkan beasiswa

Jauh sebelum mendapatkan beasiswa atau setahun setelah jadi CPNS, timbul keinginan untuk kembali ke kampus. Terinspirasi Senioreku yang telah memperoleh beasiswa dari Bappenas, aku mencari upaya agar dapat memperoleh kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Saat itu pilihan yang tersedia hanya dengan biaya sendiri, seperti yang dilakukan oleh salah satu temanku. Tentu saja hal itu mustahil bagiku yang masih bergaji Rp 320.000,- per bulan. Mau minta bantuan ke orang tua juga sepertinya tidak mungkin karena aku adalah sulung dari 5 bersaudara, sedang 3 adikku masih berjuang menyelesaikan S1. Ketika temanku mendapatkan ijin belajar untuk melanjutkan S2, aku memeluknya sambil dalam hati aku berdoa "semoga aku dapat menyusul, ya Allah bukakanlah kesempatan itu."

Beruntung bagiku, aku masih memiliki teman-teman waktu kuliah S1, sebagian dari mereka berprofesi sebagai dosen dan peneliti. Terkadang mereka melibatkanku dalam kegiatan dan seminar yang mereka adakan. Sehingga walaupun aku sudah berada di birokrasi yang lebih bersifat teknis tapi hasil dari sesekali berkomunikasi dengan teman-teman tersebut membuat aku selalu dapat isu-isu *update* terutama soal reformasi, kebijakan publik dan Hak-hak sipil. Dibalik itu semua, keinginan untuk sekolah lagi semakin kuat.



Saat-saat tak terlupakan bersama teman-teman semasa di MAP UGM

Hingga akhirnya, aku memperoleh informasi Beasiswa dari Pusbindiklatren Bappenas semakin kuatlah keinginanku untuk sekolah lagi. Aku mulai mengasah kemampuanku khususnya matematika dasar. Saat itu tidak mudah bagiku untuk fokus karena lagi hamil tujuh bulan calon anak ke dua. Dalam hati aku berdoa "semoga anak yang masih di perutku kelak menjadi anak yang cerdas, karena ikut belajar dengan ibunya."

Menjelang waktu pemberitahuan peserta yang lulus seleksi, aku menunggu dengan harap-harap cemas. Karena data dari Bappenas belum bisa dibuka. Aku memberanikan diri untuk menelepon ke pusbindiklatren-Bappenas. Telepon pertama tidak diangkat. Aku berhenti sejenak dan menarik napas panjang, dan menelepon lagi sampai terdengar jawaban seorang wanita dari ujung sana. Sampai saat ini, aku tidak pernah melupakan percakapan hari itu, jawabannya sangat melegakan karena namaku masuk dalam daftar calon yang diterima. Kelak, suara perempuan yang menerima teleponku saat itu akan menjadi teman "terhebatku" di Kelas Bappenas II MAP UGM tahun 2007/2008.

Pengalaman Studi

Hal penting yang didapat setelah mengikuti studi, di dalam pekerjaan saya terbiasa membuat alternatif-alternatif kebijakan. Terbiasa menyusun beberapa pilihan kebijakan beserta resikonya.

Selama mengikuti studi di MAP banyak sekali mata kuliah yang sulit dimengerti dan diserap, namun semua teori tersebut ternyata baru terasa manfaatnya dalam pekerjaan setelah secara langsung mengalaminya di lapangan.

Studi di MAP UGM membuat saya dan teman-teman cukup kewalahan, jadwal kuliah yang sangat padat

juga tugas-tugas kuliah yang cukup menyita waktu. Tak sedikit teman-teman yang mengalami sakit di awal kuliah, bahkan berat badan saya sempat turun beberapa kilogram.

Namun saya dan teman-teman mempunyai trik tersendiri dalam menghadapi kuliah yang begitu padat. Kami berusaha membuat suasana kelas menjadi santai dan rileks supaya saat perkuliahan dimulai tidak terlalu tegang. Ini setelah saya memperhatikan teman saya bernama Amir yang selalu duduk di pojok belakang yang sepertinya mengikuti perkuliahan dengan santai tapi buktinya dia sehat-sehat saja. Alhasil cara itu kami terapkan dan berhasil mengatasi ketegangan selama kuliah.

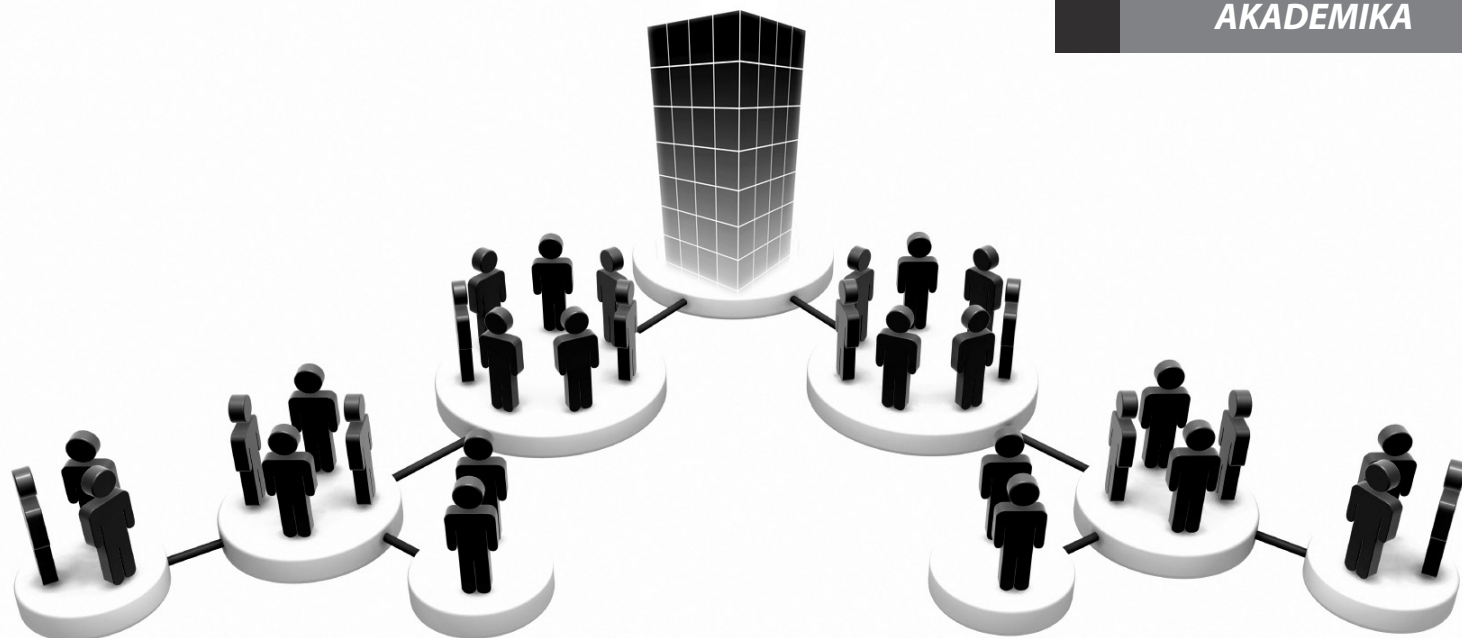
Kami juga pernah melakukan *field trip* ke Magelang, di sana saya melihat Desa Wisata Candirejo. Saya menganalisa bagaimana profesi-profesi masyarakat desa diberdayakan kemudian dikemas menjadi sebuah paket wisata menarik dimana wisatawan bisa ikut masuk dalam kegiatan keseharian masyarakat. Wisatawan yang berkunjung di inapkan di rumah penduduk, kemudian diajarkan kesenian tradisonal. Di sana saya bisa belajar tentang manajemen, bagaimana kepala desa mengkoordinasi masyarakat tetap bekerja sesuai kesehariannya dan bisa dikemas secara menarik kemudian menghasilkan keuntungan secara ekonomis bagi masyarakat desa.

MAP UGM menurunkan dosen-dosen terbaiknya dalam membimbing kami, mereka adalah pakar-pakar di bidangnya. Mereka menginginkan kami memperoleh ilmu yang seharusnya kami harus bisa menguasainya.

Banyak sekali pengalaman yang di cocokkan dengan konsep teori. Saya banyak belajar bagaimana kebijakan publik dirancang, dan bagaimana alternatif kebijakan dibuat.

Saran

Sebenarnya banyak sekali rekan-rekan yang ingin mengikuti kuliah namun terbentur faktor usia maksimal yang ditetapkan Pusbindiklatren Bappenas (40 tahun). Sekolah sebaiknya tidak semata-mata karena jabatan, karena ilmu yang di dapat sangat berguna di pekerjaan, karena penilaian tak selamanya harus dengan memangku jabatan namun bagaimana kita menghargai diri dengan melihat bagaimana perjuangan mulai dari mengikuti seleksi hingga meraih gelar master. Ada saatnya kualitas kita akan dihargai.



Nawa Murtiyanto *)

TRANSFORMASI STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

Studi Proses Transformasi Organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2009

Arus otonomi daerah yang bertujuan untuk mewujudkan *good governance*, menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan perubahan paradigma pemerintahan dari paradigma *government* menjadi paradigma *governance*. Perubahan paradigma tersebut berimplikasi pada penataan wewenang dan fungsi Organisasi perangkat daerah (OPD), Upaya pemerintah dalam mewujudkan *good governance* sehubungan dengan penataan OPD ditunjukkan dengan diterbitkannya berbagai peraturan, perundang-undangan yang mengatur penataan organisasi pemerintah daerah, sehingga terjadi perubahan (transforming) organisasi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Kebijakan penataan kelembagaan yang ada selama

ini dinilai belum menunjukkan adanya upaya yang serius dalam melakukan analisis terhadap efisiensi dan eksistensi organisasi, sehingga struktur organisasi birokrasi menjadi terlalu banyak namun double fungsi; penataan organisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam era otonomi daerah, lebih dimaknai sebagai pembengkakan struktur organisasi pemerintah daerah. Secara teoritis, semakin besar ukuran organisasi, maka struktur organisasi semakin bercirikan formalisasi, sentralisasi dan kompleksitas - di mana ketiga ciri tersebut merupakan dimensi inti dari struktur organisasi.

Salah satu pemerintah daerah yang telah melakukan penataan organisasi mendapatkan apresiasi oleh banyak pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan



dan pembangunan adalah Pemerintah Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan tiga kali penataan organisasi pemerintah daerah selama era otonomi daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah, yaitu pada Perda No.12 tahun 2000, Perda No.12 tahun 2003 dan Perda No.9 tahun 2009. Dari tiga kali penataan tersebut, terjadi peningkatan besaran organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman, yaitu 33 OPD pada tahun 2001, 40 OPD pada tahun 2003 dan 46 OPD pada tahun 2009. Kondisi tersebut yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian terhadap transformasi organisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 - 2009.

Penelitian ini, yang menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan paradigma positivisme dan pendekatan kualitatif, menyatakan bahwa proses transformasi organisasi adalah pentahapan perubahan organisasi yang dipengaruhi oleh lingkungan organisasi dengan menggunakan pendekatan tertentu; dan transformasi struktur organisasi adalah perubahan dimensi struktur organisasi yang diindikasikan dengan perubahan tingkat formalisasi, sentralisasi dan kompleksitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor

determinan dalam transformasi organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman berasal dari lingkungan eksternal, yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat dan mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap sebagian kecil dimensi struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman. Tidak berlebihan kiranya, penelitian ini menyatakan bahwa transformasi organisasi dan transformasi struktur organisasi.

Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami kemandegan atau stagnasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan internalisasi tipologi organisasi publik dalam transformasi struktur organisasi pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Proses transformasi organisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 - 2009 telah menunjukkan bahwa penataan organisasi perangkat daerah bukanlah perkara yang bisa dikatakan mudah bahkan cenderung rumit. Banyak faktor lingkungan organisasi yang seharusnya diperhatikan agar transformasi organisasi mampu menghasilkan sebuah perubahan yang sesuai dengan dinamika lingkungan. Berdasar tujuan

dari penelitian ini untuk mendeskripsikan proses transformasi organisasi, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor determinan dalam transformasi organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat. Kesimpulan ini didasarkan pada dua argumen, yaitu: pertama, peraturan perundang-undangan tersebut mempengaruhi Masukan, Transformasi dan Umpan Balik Eksternal; dan kedua, peraturan perundang undangan lebih dijadikan dasar pembahasan dalam proses transformasi organisasi dibandingkan dengan elemen lingkungan organisasi lainnya.
2. Proses transformasi organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman juga menunjukkan bahwa faktor lingkungan organisasi berpengaruh kuat terhadap proses penataan organisasi dan sekaligus memunculkan pola interaksi antara organisasi dengan lingkungannya, baik yang eksternal maupun internal. Dari kedua lingkungan organisasi tersebut dapat dinyatakan bahwa pengaruh lingkungan eksternal organisasi lebih kuat dibandingkan pengaruh lingkungan internal organisasi terhadap transformasi organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2008 - 2009.
3. Pendekatan yang digunakan dalam transformasi organisasi adalah *Delegated Power - The Data-Decision Approach*. Pendekatan ini dilakukan oleh agen pembaharu - baik dari internal maupun eksternal organisasi, yang menyajikan data sebagai umpan balik bagi orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut.
4. Di sisi lain, proses transformasi organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki tiga kelemahan mendasar, yaitu:
 - a. Kelemahan pertama, transformasi organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman

mengabaikan faktor (variabel) lingkungan eksternal selain peraturan perundang-undangan, yang secara substantif berhubungan erat dengan keberlangsungan kehidupan organisasi di masa yang akan datang; contohnya: perekonomian daerah, jumlah keluarga miskin, atau variabel lainnya yang mempunyai konteks yang identik dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sleman.

- b. Kelemahan kedua adalah lingkungan eksternal yang dijadikan Sumber Energi Eksternal memiliki keterbatasan dalam cakupan dan penilaian potensi daerah dikarenakan tidak menggambarkan kompleksitas dan realitas yang ada.
- c. Kelemahan ketiga adalah transformasi organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman kurang memperhatikan lingkungan internal organisasi yang seharusnya dijadikan pertimbangan dalam transformasi organisasi, yaitu visi dan misi Kabupaten Sleman, sumberdaya finansial organisasi, struktur organisasi, kinerja organisasi, budaya organisasi, kompetensi dalam kepemimpinan dan sebagainya.

Ketiga kesimpulan proses transformasi organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman di atas menunjukkan bahwa transformasi organisasi yang dilaksanakan telah mengabaikan perspektif organisasi sebagai sistem terbuka, dimana keterkaitan dan ketergantungan antar unsur organisasi, dinamika organisasi dengan lingkungannya, dan kerangka obyektif telah "dikalahkan" oleh argumentasi dan pemikiran formal yang cenderung parsial dalam memandang organisasi lingkungan organisasi.

Sedangkan untuk tujuan penelitian yang mendeskripsikan transformasi organisasi struktur organisasi (sebagai bagian dari proses transformasi organisasi pemerintah Kabupaten Sleman, maka kesimpulan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Transformasi organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman yang dilaksanakan pada tahun 2008 - 2009 telah menghasilkan sebuah struktur organisasi yang "baru". Struktur organisasi yang baru tersebut, ditunjukkan penambahan jumlah nomenklatur satuan organisasi, perkembangan tipe struktur organisasi dan penambahan jumlah satuan organisasi.
2. Meskipun nomenklatur satuan organisasi mengalami penambahan dan tipe struktur organisasi mengalami perkembangan, perubahan tersebut tidak mempengaruhi dimensi struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Sedangkan penambahan jumlah satuan organisasi berpengaruh pada perubahan sebagian variabel dimensi struktur organisasi. Variabel dimensi struktur organisasi yang mengalami perubahan adalah spesialisasi fungsional dan rentang kendali, variabel penyebaran jumlah dan penyebaran jarak yang berubah secara parsial, serta perubahan standarisasi dalam dokumen utama.-- yang sebenarnya tidak berimplikasi apapun. Sedangkan variabel lainnya tidak mengalami perubahan yang substantif.
4. Perubahan spesialisasi fungsional dan perubahan rentang kendali merupakan akibat yang otomatis terjadi dikarenakan bertambahnya jumlah satuan organisasi. Perubahan variabel penyebaran jumlah dan penyebaran jarak terjadi parsial, karena hanya terjadi pada sebagian satuan organisasi yang merepresentasikan diflerensiasi spasial. Perubahan standarisasi dalam dokumen utama pun tidak memberikan implikasi apapun.
5. Di sisi lain, transformasi struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki beberapa kelemahan mendasar, yaitu:
 - a. Spesialisasi fungsional dilakukan dengan mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat.
 - b. Diferensiasi vertikal yang dilaksanakan mengakibatkan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman yang (tetap) berorientasi pada atasan.
 - c. Departementalisasi yang dilakukan dengan pendekatan *top-down*.
 - d. Desentralisasi yang diupayakan merupakan desentralisasi semu.
 - e. Standarisasi belum mempunyai kekuatan yang kuat (memaksa) dalam pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Kelima kesimpulan transformasi struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman di atas menunjukkan bahwa transformasi struktur organisasi yang telah dilaksanakan, hanya merubah sebagian kecil dari variabel dimensi struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, sullt kiranya mengharapkan adanya transformasi terhadap komponen organisasi lainnya (teknologi, tugas dan sumberdaya manusia).

SARAN

Memperhatikan kesimpulan penelitian di atas - terutama pada bagian kelemahan yang terdapat dalam transformasi organisasi dan transformasi struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman, maka penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Transformasi organisasi hendaknya lebih memberikan perhatian yang berimbang terhadap variabel lingkungan eksternal organisasi selain peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat, yaitu kompleksitas dan realitas potensi daerah Kabupaten Sleman.
2. Transformasi organisasi hendaknya dilaksanakan dengan mendasarkan pada lingkungan internal organisasi, yaitu mengacu pada visi dan misi Kabupaten Sleman dan melakukan kajian yang mendalam terhadap sumberdaya finansial organisasi, struktur organisasi, kinerja organisasi,

budaya organisasi, kompetensi dalam kepemimpinan dan sebagainya.

3. Transformasi organisasi hendaknya tidak dimaknai sebagai penambahan besaran organisasi semata, namun harus dimaknai perubahan secara mendasar terhadap variabel utama organisasi, yaitu: tugas, teknologi, struktur dan sumberdaya manusia.
4. Stagnasi dalam transformasi struktur organisasi dapat dihindari dengan melaksanakan internalisasi terhadap struktur organisasi. Internalisasi adalah teknik yang “memasukkan” tipologi organisasi publik ke dalam penyusunan satuan organisasi yang berbasis pada jejaring aktivitas pemerintah daerah. Internalisasi dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu menyusun jejaring aktivitas pemerintah daerah, melakukan Analisis Beban Kerja, dan menentukan jenis dan jumlah satuan organisasi pemerintah daerah. Internalisasi bertujuan untuk mendapatkan deskripsi yang lebih mendekati kenyataan sehingga *over lapping* tugas pokok dan fungsi antar satuan organisasi, tumpang tindih kegiatan, inefisiensi, dan kebingungan masyarakat resiko/dampak negatif dapat diminimalisir.
5. Transformasi struktur dilaksanakan yang didasarkan pada pola pelaksanaan aktivitas pemerintah daerah, diharapkan struktur organisasi akan berorientasi pada tugas dan departementalisasi disusun dari bawah (bottom-up), yaitu dari satuan organisasi pada layer terbawah (Klaster II - 2 atau Klaster III).
6. Transformasi struktur organisasi yang menyebabkan penambahan satuan organisasi hendaknya disertai dengan upaya desentralisasi yang nyata ke satuan organisasi di klaster di bawahnya.
7. Transformasi struktur organisasi juga harus dibarengi upaya formalisasi (standarisasi) pelaksanaan tugas satuan organisasi secara tegas dan tepat.

*) **Penulis adalah Karyasiswa Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas di Program Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada**





MERAJUT MASA DEPAN Bauxit KALBAR

Oleh: Sahat Sinaga *)

Membaca data ekspor Kalbar tahun 2010 yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi, ada sesuatu yang berbeda dari tampilan komoditas ekspor sebagaimana biasanya, yaitu karet diurutan pertama diikuti kayu, dan lainnya diurutan berikutnya. Kali ini nama yang muncul diurutan pertama sekaligus sebagai pendatang baru dalam kelompok 3 besar adalah Bijih Kerak (Bauxit) dengan nilai US\$.322 juta atau dengan kontribusi sebesar 32,10% dari total nilai ekspor, diikuti diurutan kedua Karet dengan nilai US\$.313 juta atau dengan kontribusi sebesar 31,24%, dan komoditi lainnya. Komoditi ini cukup menjadi perhatian bagi peserta yang mengikuti publikasi data BPS, sehingga kami pun tergerak untuk mencari tahu hal-ikwal mengapa komoditi ini bisa masuk dalam daftar penghasil devisa.

Cerita bahan tambang bauxit di Kalbar memang tidak asing lagi, diawali dengan kegiatan eksplorasi yang dilakukan PT. Alcomin perusahaan bentukan Pemerintah RI dan ALCOA perusahaan peleburan alumina terbesar di USA yang hasil eksplorasinya dilaporkan pada tahun 1974 (*Rekaman hasil eksplorasi ada di Dinas ESDM Prov.Kalbar*). Sementara itu dari hasil eksplorasi di Provinsi lain, tidak ditemukan potensi yang besarnya seperti di Kalbar kecuali sedikit di Pulau Bintan Provinsi Riau. Belakangan diketahui bahwa Indonesia memiliki cadangan bauxit terbesar ke 7 di Dunia yang keberadaannya terkonsentrasi di bumi Kalbar.

Tidak begitu jelas diketahui mengapa kegiatan eksplorasi yang dilakukan PT. Alcomin di Kalbar tidak diteruskan ke tingkat eksploitasi atau ke tingkat yang lebih tinggi lagi.

Oleh karena PT. Alcomin tarik diri pada akhir tahun 70an, praktis hasil eksplorasinya menjadi milik Pemerintah. Tidak lama kemudian pada awal tahun 80an sebagian besar eks wilayah eksplorasi PT. Alcomin diberikan kepada PT. Aneka Tambang. Ketika itu cukup besar harapan masyarakat Kalbar agar potensi yang terpendam tadi dapat diolah, maklum perusahaan yang ditunjuk untuk melanjutkan kegiatan pertambangan bauxit tersebut adalah BUMN yang dianggap cukup *bonafide*. Dengan menggunakan hasil eksplorasi PT. Alcomin, diharapkan ketika itu PT. Aneka Tambang tidak perlu lagi mulai dari nol, dan tinggal melangkah saja untuk membuat studi kelayakan, rencana bisnis, rencana teknis dan operasional tahunannya.

Dalam perjalanan untuk menindak-lanjuti Izin yang telah diberikan kepada BUMN dimaksud, dari beberapa sumber mengungkapkan bahwa pada intinya PT. Aneka Tambang tidak siap dan fokus dalam upaya untuk mewujudkan penugasan yang telah diberikan pemerintah. Salah satu hal yang bersifat prinsip dan sering disampaikan perusahaan kepada publik adalah soal mitra Kerja yang sulit didapat atau belum cocok, dan selalu saja hal ini terkait dengan persoalan teknologi. Agaknya dalam hal bauxit ini PT. Aneka Tambang tidak punya *blue print* dan skenario, mau diapakan benda tersebut sehingga boleh jadi keputusan terhadap pengelolaan bauxit sangat tergantung dari kehendak mitra merjanya.

Dalam hubungannya dengan pengolahan bauxit, apabila kita meletakkan harapan untuk mendapatkan manfaat tertinggi dari bahan baku ini, satu-satunya jalan tentu dengan cara mengolahnya untuk menghasilkan produk yang kita kenal dengan nama Alumunium,

Dalam proses pengolahan bauxit untuk kemudian menjadi Produk Alumunium diakui memang tidak mudah. Disamping kita belum punya keahlian dan pengalaman dalam pengolahannya, juga memerlukan investasi yang demikian besar. Investasi yang vital adalah ketersediaan energy yang tidak tanggung-tanggung besarnya. Dalam garis besarnya, bauxit diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan alumina (smelter grade). Kemudian dari alumina tadi diolah / dilebur menjadi Alumunium (murni). Terakhir, dibentuk melalui proses alloying (pencampuran dengan logam lain agar lebih kuat) sesuai dengan kebutuhan industri atau permintaan pasar.

Untuk memenuhi permintaan pasar, pemanfaatan alumunium ke depan sudah sering disuarakan oleh para ahli bahwa produk ini sangat menjanjikan dengan keunggulan ringan, padat dan tidak berkarat sehingga disebut sebagai Logam Masa Depan. Sering kita lihat keberadaan allumunium di hampir semua jenis kendaraan, motor, kereta, kapal, pesawat. Bahkan alat-alat rumah tangga yang dinilai bermutu baik umumnya berasal dari bahan logam ini. Untuk tujuan inilah bauxit sangat meluas digunakan, Sementara itu masih ada bagian kecil bauxit untuk tujuan terbatas, menghasilkan apa yang disebut Alumina Chemical Grade, merupakan produk akhir dengan penggunaan yang beragam, umumnya digunakan sebagai bahan pembungkus.

Meskipun sudah ada keinginan untuk mengolahnya melalui penugasan kepada PT. Aneka Tambang pada tahun 90an, tetapi dengan alasan krisis ekonomi pada tahun 1997/98, proyek tersebut tertunda. Lebih lanjut, tampaknya Pemerintah sampai sekarang pun belum menentukan sikap tegas, mau diapakan bauxit ini. Pemerintah cenderung mengikuti apa yang menjadi keputusan atau kemauan perusahaan



Bauxit.
Tambang bauxit masih menjadi daya tarik investasi di Kalbar

dan boleh dikatakan tidak memberikan sentuhan kebijakan agar bauxit dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dengan kondisi tersebut dihubungkan dengan cerita awal mengenai data ekspor bauxit Kalbar, apakah ada yang tidak beres..? Jawabannya bisa saja “Ya” atau “Tidak”. tergantung dari sudut mana melihatnya.

Masukan dari rekan diskusi, yang kami anggap mewakili dari kelompok bisnis mengemukakan; mereka memanfaatkan saja peluang yang ada sejauh tidak melanggar aturan. Pendapat ini sungguh praktis, tapi juga padat, tajam dan terpercaya, maklum kegiatan yang mereka garap lumayan menguntungkan. Boleh dikatakan daya tarik investasi di bidang tambang yang satu ini lagi ngetren karena keuntungan yang bakal mereka peroleh begitu menjanjikan. Dari sumber yang dapat dipercaya menyebutkan bahwa dalam dua tahun terakhir ini saja sampai dengan tahun 2010, Ijin para Bupati se-Kalbar untuk kegiatan Explorasi dan

Exploitasi telah diberikan kepada sekitar 130 (seratus tiga puluh) perusahaan. Dalam keadaan normal tidak heran apabila mereka yang sekarang sudah menjadi produsen bauxit, dalam waktu yang tidak begitu lama juga sekaligus sebagai eksportir bauxit.

Sementara itu, gerak maju usaha PT. Aneka Tambang yang tadinya diharapkan sebagai pioneer, belum terdengar memiliki rekaman prestasi. Kalau pun ada, yaitu penancangan untuk memulai kegiatan pembangunan industry Alumina (Chemical Grade) yang diresmikan oleh Menteri Perindustrian bulan April 2011 di Tayan. Dalam hal ini penggunaan bahan baku bauxitnya tidak seberapa besar, sekedar untuk membedakan kalau yang diresmikan tadi misalnya adalah untuk pembangunan industry Alumina Smelter Grade maka hasilnya akan berlipat ganda.

Lebih lanjut, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan nilai strategis dari bauxit yang kita miliki, sekaligus memberi masukan dan mengkritisi kebijakan Pemerintah selama ini dengan

maksud agar kelak dikemudian hari pengelolaannya lebih optimal dan hasilnya berdampak luas untuk kemajuan Nasional dan Daerah.

Pertama: Dalam hubungannya dengan pengelolaan sumber daya alam, kita dapat belajar dari masa lalu dalam hal mengelola hasil hutan/kayu. Hasil hutan yang kita miliki adalah merupakan warisan kekayaan alam, namun dari pengalaman dalam menanganinya ternyata tidak banyak manfaat yang kita peroleh, meskipun hutan masih bisa diperbaharui (renewable). Sementara itu bauxit yang merupakan warisan kekayaan alam yang tidak bisa diperbaharui (non renewable) seharusnya Pemerintah lebih hati-hati lagi dalam mengurus/ menanganinya. Meskipun sudah ada aturan yang memungkinkan atau kemudahan bagi para pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya, namun masih diperlukan kearifan lokal dalam implementasi dan pembinaannya, agar mereka tidak sekedar memanfaatkan peluang yang ada, termasuk kelemahan birokrasi. Begitu juga dengan ke hati-hatian mengenai dampak lingkungan karena kegiatan penambangan yang kita ketahui sangat akrab dengan masalah dan resikonya. Ketika beroperasi, jarang terdengar wilayah pertambangan bebas dari gangguan. Begitu juga sesudah menjadi eks lahan pertambangan, sukses dalam hal reklamasi.

Kedua: Sesungguhnya kegiatan eksploitasi dan ekspor bauxit di Kalbar merupakan pengulangan dari kegiatan yang pernah dilakukan di Pulau Bintan, Riau pada awal tahun 80-an. Ceritanya dirangkum sekaligus dengan aspek lainnya sebagai berikut. Rencana semula, yang dibangun atas dasar kerjasama Pemerintah RI dan Jepang pada akhir tahun 70an akan dibangun industri Alumina (smelter grade) di dekat sumber bahan baku untuk mendukung Industri / Peleburan Aluminium milik PT.Inalum di Asahan, Sumut. PT. Inalum ini berstatus PMA milik Jepang, dan telah beroperasi sejak tahun 1983, dengan kontrak kerjasamanya selama 30 tahun. Dengan demikian pada tahun 2013 akan terjadi pergeseran status menjadi milik Indonesia.

“ Bauxit yang tadinya akan diolah menjadi Alumina di Indonesia malah dibawa ke Jepang, diolah menjadi Alumina di Jepang, dikembalikan lagi ke Indonesia memakai jasa transportasi, perdagangan, perbankan, asuransi dan lain sebagainya milik Jepang. Implikasi dari rangkaian kegiatan ini memperlihatkan tidak banyak manfaat yang dapat diraih pihak Indonesia “

Walaupun potensi bauxit di Pulau Bintan relatif kecil, tetapi dinilai cukup untuk tahap awal pembangunan industri Alumina (*smelter grade*), dan untuk keberlanjutannya akan dipasok dari Kalbar.

Sesuatu yang sudah direncanakan tadi, ternyata tidak berjalan sesuai komitmen awal, artinya ada yang diingkari. Akibatnya bauxit yang tadinya akan diolah menjadi Alumina di Indonesia tidak jadi tetapi dibawa ke Jepang. Dalam hal ini bauxit yang kita miliki di ekspor dulu ke Jepang, diolah disana menjadi Alumina. Kemudian alumina tadi dikembalikan lagi ke Indonesia atau tepatnya ke Proyek Asahan yang dikelola PT.Inalum. Implikasi dari rangkaian kegiatan ini memperlihatkan tidak banyak manfaat yang dapat diraih pihak Indonesia, oleh karena mulai dari pengangkutan bauxit menggunakan kapal Jepang, diolah menjadi Alumina di Jepang, dikembalikan lagi ke Indonesia berikut jasa transportasi, perdagangan, perbankan, asuransi dan lain sebagainya milik mereka.

Dengan demikian keperluan alumina sebagai



bahan utama bagi pabrik peleburan aluminium di Asahan didatangkan atau diimpor dari Jepang yang notabene bahan baku bauxitnya berasal dari tempat kita. Beberapa tahun kemudian seiring dengan semakin menipisnya cadangan bauxit di Pulau Bintan, pasokan Alumina berikutnya sampai sekarang didatangkan dari Australia. Tidak cukup sampai disitu kita sebagai penonton, ketika akan diolah menjadi Aluminium, mengingat energy yang diperlukan demikian besar maka sumber daya air yang kita miliki dari Danau Toba pun sudah mereka kuasai yaitu PLTA Tangga dan PLTA Sigura-gura dengan kemampuan sekitar 600 MW. Bandingkan dengan kapasitas listrik se-Kalbar, separuhnya pun belum sampai. Begitu besarnya energy yang diperlukan untuk memproduksi / melebur Aluminium, berakibat tidak ada tercatat penduduk sekitar Danau Toba yang dapat menikmati listrik dari sumber energy yang mereka miliki. Kekuatan energy 600 MW dimaksud adalah untuk menghasilkan produksi Aluminium sebesar rata-rata 225.000 ton per tahun. Dalam hitungan sederhana, untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri saja produksi yang dihasilkan PT.Inalum tersebut masih kurang.

Dari cerpen butir dua ini, tidak tahu mengapa kejadiannya bisa seperti itu yang akibatnya sangat

“ Dalam kurun waktu yang cukup panjang sejak tahun 1974 agaknya kita tidak begitu peduli dengan adanya peluang yang dapat dimanfaatkan dari Bauxit, sampai kemudian pada bulan Mei 2011 ada secercah harapan untuk mengolah Bauxit Kalbar melalui Kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI)”

merugikan pihak Indonesia. Barangkali sebagai akibat dari ketidak-pedulian kita selama ini mengenai masa depan bauxit, lagi-lagi kita perlu mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Disisi lain, kita juga melihat inilah hebatnya Pemerintah Jepang dalam memainkan perannya. Praktis mereka tidak punya SDA baik bahan baku maupun energy yang besar untuk memproduksi Aluminium, tetapi mereka dapat mengendalikan kegiatan dari hulu sampai hilir.

Ketiga: Dalam kurun waktu yang cukup panjang sejak tahun 1974 agaknya kita tidak begitu peduli dengan adanya peluang yang dapat dimanfaatkan dari bauxit, sampai kemudian pada bulan Mei 2011 ada secercah harapan untuk mengolah bauxit Kalbar melalui Kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Melalui kebijakan MP3EI, kita semakin disadarkan lagi untuk lebih serius menangani bauxit karena untuk pertama kalinya komoditi ini disebut dalam kebijakan Nasional, dan satu-satunya tempat yang disebut hanya Kalbar. Pesan yang disampaikan melalui MP3EI ini, intinya adalah agar semua Daerah dapat mengolah sumber daya alam yang dimilikinya. Dan dalam mengikuti perkembangan kegiatan MP3EI dimaksud, secara *exercises academic* terungkap bahwa pengolahan bauxit menjadi

produk aluminium pengaruhnya luar biasa dalam proses pembangunan, perspektifnya adalah sebagai berikut. Apabila kita hanya menghasilkan bauxit maka nilai tambahnya hanya sebesar 1 (satu) kali. Apabila kita mengolah bauxit untuk menghasilkan alumina smelter grade maka nilai tambahnya sebesar 8 (delapan) kali. Berikutnya apabila kita mengolah Alumina menjadi Alluminium (murni) maka nilai tambahnya sebesar 30 (tiga puluh) kali. Selanjutnya apabila kita teruskan lagi mengolah Alluminium menjadi produk akhir maka nilai tambahnya akan menjadi jauh lebih besar.

Terakhir: Mengingat betapa penting dan strategisnya bauxit ini, kita perlu segera menindaklanjuti atau menterjemahkan MP3EI ke dalam suatu dokumen perencanaan, katakanlah dengan menyusun Rencana Strategis Pengembangan bauxit Kalbar. Isi dari pada dokumen dimaksud, intinya adalah Strategi dan Program dalam mewujudkan proses industrilisasi berbasis bauxit di Kalbar.

Perlu sekedar untuk mengingatkan bahwa dalam konsep MP3EI, Koridor Ekonomi Kalimantan dengan tema pembangunan; Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional. Terjemahan dari sub tema pembangunan yang pertama, jelas menghendaki bahwa komoditas bauxit wajib kita produksi dan olah. Kemudian dari sub tema kedua sebagai Lumbung Energi Nasional, juga menghendaki agar sumber energy besar yang kita miliki yaitu Uranium dapat dimanfaatkan untuk PLTN, bukan hanya untuk penelitian. Tentunya dengan orientasi atau cara pandang seperti itu, kita dapat menyusun Rencana Pengembangan bauxit dengan baik yang mengikutsertakan rencana pembangunan PLTN. Sangat diyakini apabila skenario ini diwujudkan, Indonesia akan bisa memproduksi Aluminium paling efisien di dunia karena dua komoditi strategis tersebut ada di satu tempat. Selebihnya mungkin sudah tidak terlalu berat lagi karena bersifat dukungan terhadap kegiatan utama seperti infrastruktur, SDM dan regulasi yang diperlukan. Keseluruhan

konsep pembangunan dimaksud hendaknya dengan mengandalkan kekuatan Nasional, tidak lagi tergantung dengan Mitra Asing. Pemerintah dapat saja sewaktu-waktu membentuk Lembaga atau BUMN untuk menanganinya. Kalau kita tidak punya kiat begitu, mungkin banyak di antara anak bangsa akan merasa malu kalau sampai hari ini kita belum bisa mengolah bauxit, apa kata dunia. Oleh karena komoditas yang satu ini rada unik, tidak ada di provinsi lain selain Kalbar dan juga diantara semua komoditas yang disebut di dalam MP3EI tampil dengan nilai lebih, termasuk dalam pengertian berdampak luas bagi pembangunan ekonomi Nasional, maka untuk itu perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Menurut hemat kami, idealnya penyusunan dokumen dimaksud dilakukan oleh Pusat, namun demikian Daerah juga perlu mengambil inisiatif.

Selanjutnya apabila dokumen dimaksud sudah siap tentu saja dengan harapan kegiatan ini sudah bisa dilihat masyarakat dalam waktu dekat, atau paling tidak sudah dirasakan manfaatnya sebelum durasi MP3EI berakhir tahun 2025.

***) Penulis adalah Perencana Madya
Bappeda Provinsi Kalbar**



Sumber: aanger.blogspot.com

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sebuah Perspektif Terkini

Oleh: Agussalim *)

Realitas kemiskinan di Indonesia saat ini menyisakan banyak pertanyaan: mengapa penurunan angka kemiskinan berjalan sangat lamban ditengah kinerja makro-ekonomi yang terus membaik?; mengapa secara absolut jumlah penduduk miskin masih menembus angka sekitar 30 juta orang padahal garis kemiskinan yang digunakan ekuivalen dengan harga karcis sekali masuk jalan tol (Rp 8.000 per orang per hari atau hanya setara US\$1,2/PPP). Mengapa di tengah upaya yang gencar untuk memerangi kemiskinan, justru jumlah penduduk miskin di beberapa wilayah malah bertambah?; mengapa anggaran pengentasan kemiskinan yang sangat fantastis (dari APBN saja menembus angka di atas Rp 80 triliun, belum termasuk APBD provinsi dan kabupaten/kota) tidak bekerja efektif untuk

menurunkan angka kemiskinan secara signifikan?; mengapa keterlibatan lembaga-lembaga donor secara intens dalam program pemberantasan kemiskinan tidak memberi manfaat yang setara?

Keseluruhan realitas di atas tampaknya menegaskan perlunya diinjeksi perspektif dan pendekatan baru dalam penanganan kemiskinan. Perspektif dan pendekatan baru dimaksud antara lain:

Pergeseran paradigma. Pertumbuhan ekonomi konvensional (kenaikan PDRB riil) tampaknya tidak bisa lagi sepenuhnya diandalkan untuk menurunkan angka kemiskinan. Hubungan korelasional antara pertumbuhan ekonomi konvensional di satu sisi dan pengentasan kemiskinan, perbaikan

distribusi pendapatan, dan perbaikan taraf hidup masyarakat di sisi lain, seperti yang dipahami dalam paradigma efek menetes ke bawah (*trickle down effect*), ternyata juga tidak terbukti. Pertumbuhan ekonomi konvensional semakin diragukan efektifitasnya seiring dengan terjadinya divergensi antara pertumbuhan ekonomi dengan perbaikan taraf hidup masyarakat kelas bawah. Pada titik ini, kesangsihan atas pertumbuhan ekonomi konvensional, termasuk angka statistik yang menyertainya, menjadi tak terelakkan.

Pertumbuhan ekonomi konvensional yang bertumpu pada variabel makro-ekonomi, terutama arus modal masuk, penanaman modal, dan peningkatan ekspor, memang seringkali tidak memiliki kaitan yang kuat dengan pengentasan penduduk miskin. Kaitan tersebut menjadi semakin lemah, ketika arus penanaman modal tersebut lebih banyak bergerak pada usaha padat modal (misalnya, industri telekomunikasi) dan sektor-sektor yang memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang rendah (misalnya, sektor lembaga keuangan; hotel dan restoran; listrik, air bersih dan gas).

Oleh karena itu, pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*) ataupun pertumbuhan berkualitas (*the quality of growth*) ataupun pertumbuhan yang berpihak kepada kaum miskin (*pro-poor growth*), sebagai sebuah terminologi baru dalam wacana pembangunan dewasa ini, perlu didorong dan diintensifkan, baik pada tingkatan rencana maupun pada tingkatan implementasi. Konsep ini lebih mementingkan “dampak” ketimbang sekedar angka statistik. Pertumbuhan ekonomi dikatakan inklusif, berkualitas atau berpihak kepada kaum miskin jika mampu mengurangi angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, memperbaiki distribusi pendapatan, mengangkat taraf hidup masyarakat kelas bawah, dan seterusnya. Pertumbuhan ekonomi Cina yang fantastik misalnya, ternyata tidak sepenuhnya diapresiasi oleh para penggiat pembangunan karena dianggap tidak *pro-poor*. Penyebabnya, karena kelompok penduduk kelas atas mengalami kenaikan pendapatan yang

jauh lebih cepat ketimbang kelompok penduduk kelas bawah. Artinya, distribusi pendapatan semakin timpang di Cina.

Secara konseptual, pertumbuhan inklusif lebih mementingkan indikator-indikator kesejahteraan (*welfare*) ketimbang pertumbuhan (*growth*). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi konvensional dan pendapatan per kapita, yang selama puluhan tahun telah dijadikan sebagai indikator utama pembangunan, dianggap sudah tidak relevan lagi dan perlu segera dikoreksi. Sebaliknya, kemampuan daya beli dan konsumsi, akses terhadap pangan dan pekerjaan, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, akses terhadap sumberdaya ekonomi dan kepemilikan aset, lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat, dianggap sebagai indikator pembangunan yang lebih realistis karena lebih mencerminkan kualitas pembangunan yang sesungguhnya.

Pergeseran arah studi. Dalam banyak kasus, kemiskinan selalu dipandang dari perspektif makro. Studi-studi kemiskinan pada umumnya lebih fokus pada aspek relasional antara kebijakan makro dan kemiskinan, misalnya dampak subsidi BBM terhadap kemiskinan, dampak BLT terhadap taraf hidup penduduk miskin, dampak kenaikan harga beras terhadap angka kemiskinan, dan seterusnya. Hasil studi semacam ini potensial melahirkan debat dan polemik. Kita tidak pernah sepenuhnya yakin hasil studi LPEM-UI beberapa waktu lalu, yang menyimpulkan bahwa kenaikan harga BBM tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan angka kemiskinan. Kita juga tetap menyangsikan kesimpulan Bank Dunia yang menyatakan bahwa kenaikan harga beras menjadi penyebab utama terjadinya pembengkakan jumlah penduduk miskin. Kita bahkan menuduh bahwa Bank Dunia telah melakukan simplifikasi yang berlebihan atas kompleksitas masalah kemiskinan.

Mengandalkan studi makro memang seringkali tidak memuaskan. Informasi yang dihasilkan hampir tidak pernah akurat dan valid. Studi semacam ini



Sumber: cs.wikipedia.org

Kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan berjalan sangat lambat ditengah kinerja makro-ekonomi yang terus membaik

tidak pernah sanggup menyediakan informasi rinci mengenai: (i) dimana persisnya orang miskin tersebut bermukim?; (ii) bagaimana karakteristik dan profil penduduk miskin?; (iii) faktor-faktor apa menyebabkan mereka miskin?; (iv) bagaimana mengamati perubahan taraf hidup orang miskin dari waktu ke waktu?; (v) siapa saja orang miskin yang berhasil dientaskan dan siapa saja yang masih berkuat dengan kemiskinan?; (vi) mengapa kebijakan, program, dan anggaran tidak bekerja efektif bagi kaum miskin; dan seterusnya. Akibatnya, program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran, ketidak-jelasan target, bias ke orang non-miskin, menjadi berita lumrah.

Tentu saja, pertanyaan-pertanyaan di atas hanya bisa ditemukan jawabannya ketika studi kemiskinan dilakukan pada level mikro. Keunggulan studi semacam ini adalah keakurasiannya dalam mengidentifikasi karakteristik penduduk miskin, sehingga pada gilirannya sangat memudahkan dalam implementasi program dan kegiatan pengentasan kemiskinan serta melakukan evaluasi atas kemajuan yang dicapai dalam berbagai upaya pengentasan kemiskinan. Dengan studi mikro, para pengambil kebijakan tidak perlu lagi gagap setiap kali ditanya, dimana persisnya

terjadi penurunan angka kemiskinan, apa yang menyebabkan penurunan tersebut, upaya-upaya apa yang signifikan mengurangi angka kemiskinan, bagaimana efektifitas kebijakan dan program yang diimplementasikan, dst.

Perubahan pola penanganan

Arus besar (*mainstream*) penanganan kemiskinan secara global, termasuk yang dipraktekkan di Indonesia, berorientasi pada dua skema: *pertama*, menurunkan atau memperkecil beban pengeluaran penduduk miskin. Skema ini muncul dalam bentuk bantuan sosial (misalnya, BLT, Raskin, dll.), pembebasan biaya (misalnya, pendidikan dan kesehatan gratis), dan pemberian subsidi (misalnya, pupuk dan sarana produksi lainnya). *Kedua*, meningkatkan produktivitas dan pendapatan penduduk miskin. Skema ini muncul terutama dalam bentuk pembangunan infrastruktur perdesaan (misalnya irigasi, pasar, jalan desa, dsb), penyediaan skim bantuan modal usaha, dll.

Selama puluhan tahun, pola penanganan lebih menekankan pada skema pertama. Namun dalam beberapa tahun terakhir, skema kedua mulai memperoleh porsi yang lebih besar. Ini setidaknya bisa diamati dari Program PNPM yang memberi

perhatian signifikan pada dimensi pemberdayaan dan peningkatan produktivitas masyarakat, misalnya melalui penguatan kelembagaan masyarakat, perbaikan infrastruktur sosial ekonomi masyarakat, penyediaan skim bantuan modal usaha mikro dan kecil, dll.

Meskipun demikian, salah satu catatan paling krusial terkait program ini adalah *grand design*-nya masih sangat sentralistik, meskipun dikatakan bahwa program ini sudah menggunakan dan mempraktekkan pendekatan partisipatif. Pendekatan yang cenderung sentralistik, menyimpan sedikitnya empat masalah, yaitu: *pertama*, memperlakukan karakteristik kemiskinan secara seragam dan mengasumsikan tipologi kemiskinan cenderung serupa untuk semua wilayah dan daerah; *kedua*, memungkinkan terjadinya tumpang tindih (*over lapping*) penanganan antar berbagai tingkatan pemerintahan, baik dari segi program maupun anggaran; *ketiga*, pemahaman pemerintah pusat atas kondisi masyarakat lokal relatif terbatas, setidaknya jika dibandingkan dengan pemerintah daerah; dan *keempat*, inisiatif dan kreasi pemerintah dan masyarakat lokal sulit bertumbuh di dalam era sentralisasi.

Lalu, apakah penanganan kemiskinan yang desentralistik merupakan pilihan terbaik? Mungkin tidak, namun pendekatan ini masih jauh lebih baik bila dibandingkan dengan penanganan yang sentralistik. Argumentasi penting dibalik usulan ini, antara lain, pemerintah daerah memiliki pemahaman yang relatif baik tentang kondisi masyarakat lokal; ruang bagi masyarakat miskin untuk menyampaikan preferensinya relatif semakin luas; proses dan mekanisme penanganan (perencanaan, implementasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi) relatif lebih mudah, singkat, dan sederhana; keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam perumusan agenda penanganan relatif lebih mudah dibangun; tumpang tindih program dan anggaran antar berbagai tingkatan pemerintahan dapat dieliminasi; dsb.

“ Pendekatan terkini dalam perencanaan pembangunan lebih menekankan pada efisiensi dan efektifitas. Perencanaan tidak lagi bertumpu pada “apa yang akan dilakukan” melainkan “apa yang mau dicapai”

Pembaharuan desain perencanaan

Pendekatan terkini dalam perencanaan pembangunan lebih menekankan pada efisiensi dan efektifitas. Perencanaan tidak lagi bertumpu pada “apa yang akan dilakukan” melainkan “apa yang mau dicapai”. Dalam ranah perencanaan, ini disebut dengan “perencanaan berbasis sasaran”, atau biasa juga disebut “perencanaan berbasis kinerja (*performance based planning*)”.

Cara kerja pendekatan ini, pertama kali, menetapkan sasaran-sasaran terukur yang ingin dicapai. Dalam konteks kemiskinan, sasaran dimaksud dapat berupa, misalnya, jumlah penduduk miskin menurun sebesar 10.000 orang, pendapatan penduduk miskin meningkat sebesar 25 persen, 100 rumah tangga miskin memulai usaha mikro keluarga, 50 persen penduduk miskin memiliki rumah yang layak huni, dsb. Tentu saja, sasaran-sasaran terukur ini hanya bisa ditetapkan jika perencana memiliki pemahaman yang utuh dan informasi yang akurat mengenai kondisi penduduk miskin.

Setelah sasaran yang ditetapkan sudah *clear*, langkah berikutnya adalah merancang bentuk intervensi dan upaya untuk mencapai sasaran. Dalam dunia perencanaan, bentuk intervensi dimaksud diformulasi ke dalam bentuk strategi-kebijakan-program-kegiatan. Namun perumusan strategi-kebijakan-program-kegiatan dimaksud sebaiknya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk kaum miskin.



Kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan berjalan sangat lamban ditengah kinerja makro-ekonomi yang terus membaik

Tahapan berikutnya adalah implementasi strategi-kebijakan-program-kegiatan. Dalam tahapan ini harus betul-betul bisa dipastikan bahwa strategi-kebijakan-program-kegiatan tersebut sungguh-sungguh fokus ke kelompok sasaran, tidak bias ke non-miskin, tidak terjadi kebocoran anggaran, benar-benar sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin, dst.

Tahapan terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Tahapan ini diperlukan untuk memastikan bahwa strategi-kebijakan-program-kegiatan dan anggaran kemiskinan benar-benar efektif bekerja bagi kaum miskin. Tahapan ini juga diperlukan untuk memberi umpan balik (*feed back*) bagi pengambil kebijakan dalam rangka merevisi, memperbaharui, dan merekonstruksi penanganan kemiskinan di masa yang akan datang.

Perubahan metodologi

Kerangka konseptual dan metodologi pengukuran kemiskinan seyogyanya tidak melihat orang miskin sebagai orang yang serba tidak memiliki, melainkan orang yang memiliki potensi (sekecil apa pun potensi itu), yang dapat digunakan dalam mengatasi kemiskinannya. Cara pandang baru ini tidak lagi melihat "apa yang tidak dimiliki orang miskin" melainkan lebih menekankan pada "apa yang dimiliki

orang miskin". Asset perseorangan dan sosial merupakan potensi penting yang dimiliki kaum miskin, dan oleh karena itu, penanganan kemiskinan harus diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas asset tersebut.

Di kalangan para pengambil kebijakan dewasa ini, muncul persepsi yang kuat bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan upaya cerdas untuk memperbaiki "asset" kaum miskin. Diyakini bahwa dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas "asset" tersebut akan sanggup memperbaiki taraf hidup mereka dalam jangka panjang. Mengalokasikan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan dengan proporsi yang memadai, dianggap sebagai salah satu strategi terbaik untuk mereduksi kemiskinan. Dengan strategi ini diharapkan pengeluaran kaum miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dapat dikurangi, misalnya dengan cara menyediakan biaya pendidikan dan kesehatan secara gratis dan meningkatkan akses penduduk miskin terhadap fasilitas sosial dan ekonomi. Dalam jangka panjang, upaya seperti ini diharapkan akan mampu meningkatkan produktivitas penduduk miskin sehingga pada gilirannya mereka mampu melepaskan diri dari jeratan kemiskinan. Namun

tetap penting dicatat bahwa cara pandang ini masih menyimpan kelemahan karena masih melihat kemiskinan sebagai kemiskinan individu dan kurang memperhatikan kemiskinan struktural. Sistem pengukuran dan indikator yang digunakannya terfokus pada kondisi atau keadaan kemiskinan berdasarkan faktor-faktor ekonomi yang dominan. Pendekatan ini juga belum menjangkau variabel-variabel yang menunjukkan dinamika kemiskinan.

Pergeseran cara pandang

Semakin kuat disadari bahwa masalah kemiskinan tidak akan pernah selesai hanya karena menggunakan cara pandang ekonomi dan sosial. Dimensi moral penting digunakan dalam memandang persoalan kemiskinan. Proses pembangunan yang berlangsung selama ini telah melahirkan fenomena kemiskinan dengan ciri sosial-moral yang amat kental, misalnya keterbelakangan, keterpencilan, ketidakberdayaan dan ketersisihan. Ciri ini, bahkan seringkali dianggap sebagai derivasi paling buruk dari fenomena kemiskinan. Ciri ini hanya bisa dieliminasi jika dimensi moral lebih dikedepankan dalam memandang persoalan kemiskinan.

Ketika kemiskinan dilihat dari perspektif moral, definisi kemiskinan juga mengalami perluasan. Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika seseorang kehilangan harga diri, terbentur pada ketergantungan, terpaksa menerima perlakuan kasar dan hinaan, serta tak dipedulikan ketika sedang mencari pertolongan. Ciri ini, seringkali dianggap sebagai derivasi paling buruk dari fenomena kemiskinan. Dengan demikian, kemiskinan bukan lagi sekedar soal pendapatan, asset, pekerjaan, makanan, pendidikan, kesehatan, dst.

Bagaimanapun, proses pembangunan yang terlalu *ekonomi-sentris* seperti yang dipraktekkan selama ini, telah menyebabkan rapuhnya nilai-nilai sosial (*social values*) dan memudarnya kohesi sosial (*social cohesion*) dalam masyarakat. Kita dengan mudah dapat menyaksikan berbagai kerusuhan sosial (*social*

unrest), konflik vertikal dan horizontal, perampasan, kriminalitas, dan seterusnya. Di sisi lain, semangat individualistik dan kehidupan hedonisme, semakin menemukan bentuknya. Akibatnya, solidaritas sosial dan sikap empati menjadi sesuatu yang mahal dan langka. Semangat saling membantu dan gotong-royong hanya tinggal sejarah. Hubungan sosial dibungkus rapi oleh ikatan kepentingan.

Di tengah situasi seperti itu, solusinya adalah menumbuhkan-kembangkan sikap hidup sosial yang lebih egaliter, sebuah sikap yang lebih menghargai persamaan dan distribusi pendapatan yang lebih merata antar lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, yang diperlukan adalah bagaimana membangun sebuah mekanisme yang mampu menumbuhkan keinginan masyarakat untuk "menyerahkan" sebagian dari total pendapatannya guna mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih egaliterian. Dalam pandangan *egalitarian income distribution* yang diperkenalkan oleh Sir Hugh Dalton, seorang profesor keuangan publik di London School of Economics, seluruh masyarakat sesungguhnya menghendaki pemerataan, persamaan hak, dan keadilan sosial yang lebih baik guna mewujudkan kehidupan sosial yang lebih harmonis.

Untuk beralih ke perspektif dan pendekatan seperti dikemukakan di atas, mungkin dibutuhkan waktu satu-dua dekade atau mungkin satu-dua generasi. Tapi mari kita, tanpa kecuali, mulai mengayunkan langkah. Kita tidak ingin hari-hari kita dipenuhi dengan berita kematian yang memilukan akibat derita kemiskinan.

***) Penulis adalah Ketua Program Magister Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin dan Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Manajemen (P3KM) Universitas Hasanuddin, Makassar.**

REVIEW BUKU: BELAJAR GOBLOK DARI BOB SADINO

Paradigma saya sekolah dan mengenyam hidup selama 38 tahun runtuh sudah. Itu semua karena Bob Sadino. Gara-gara membaca bukunya seperti telah dicuci otak saya. Benar-benar dicuci bersih dan seperti dilahirkan kembali.

Bagaimana tidak, falsafah-falsafah bisnis dan hidup Bob Sadino sudah menjungkirbalikkan fakta tentang keyakinan yang banyak diyakini orang pintar selama ini. Apa itu? Falsafah Goblok.

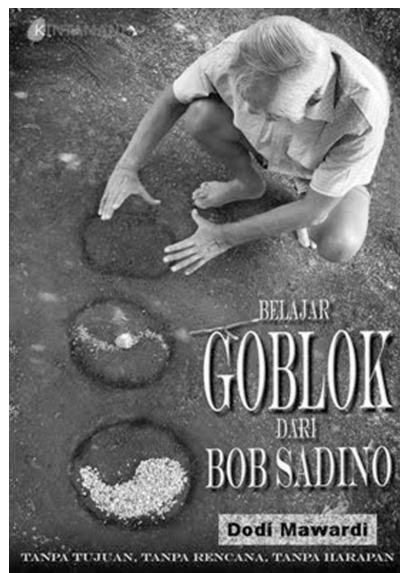
Berikut salah satu pernyataannya yang bisa membuat saya dan barangkali Anda juga menjadi tersenyum kecut, atau kening sampai berkerut-kerut bahkan mungkin bisa kebakaran jenggot karena pernyataannya yang tentu bertolak belakang 180 derajat beneran kalau dilihat dari kacamata pintar orang sekolah.

Kalau ingin sukses berbisnis Jangan pakai tujuan. Jangan pakai rencana. Jangan pula pakai harapan. Mengalir saja jalani apa adanya. Dan juga tak perlu sekolah. Catat tak perlu sekolah. Ini pesan "Goblok" tapi sebetulnya pintar yang disampaikan oleh Bob Sadino dalam sebuah bukunya yang baru selesai saya baca.

Mengapa dibilang Goblok? Karena tak pernah ada pelajaran pintar sekolah ilmu manajemen modern universitas manapun yang mengajarkan demikian. Apalagi nyuruh jangan sekolah. Hanya Bob Sadino lah satu-satunya orang yang mengajarkan pakai cara "Goblok" yang tak lazim ini.

Mengapa Bob Sadino berani bilang tak perlu sekolah? Bila Anda termasuk orang yang membangga-banggakan sekolah atau ijazah Anda, semoga Anda tak semakin marah apalagi mencak-mencak mendengar ucapannya lagi tentang sekolah. Sekolah itu racun. Catat sekali lagi, hanya membodohi Anda dengan racun informasi basi seperti sampah yang tak berguna.

Maksud dari ucapan Bob Sadino yang bisa saya tangkap adalah intinya kalau ingin pintar, salah satunya pintar berbisnis, ya bisnis saja dengan langsung praktek, just do it, tak perlu banyak mikir ini dan itu yang membuat Anda menjadi takut karena kebanyakan pertimbangan. Kebanyakan mikir malah tak jalan-jalan. Dan celaknya, kebanyakan sekolah hanya mendidik orang menjadi penakut akibat terlalu banyak dicekok i pelajaran sampah yang semakin membuat takut orang berbisnis. Ini faktanya.



Ucapan itu bukan tanpa alasan dan guyonan tapi sangat serius. Dan dalam banyak kesempatan seperti saat diundang untuk seminar-seminar atau diwawancarai media kata-kata itu sering meluncur dari mulut Bob Sadino.

Sebagai bukti ucapannya, jangan ditanya setidaknya Bob Sadino sudah membuktikan kesuksesan berbisnisnya pada dirinya sendiri dengan memakai cara-cara "Goblok". Coba bayangkan dari awalnya menjajakan telur door to door sampai akhirnya bisa punya rumah megah, mobil Jaguar dua sampai punya supermarket Kem Chick yang terus berkembang pesat dan punya pabrik sosis & ham Kem Food dan juga punya pabrik pengolah sayur Kem Farm.

Apa itu masih belum cukup untuk membuktikan bahwa teori "Goblok" Bob Sadino sebetulnya adalah pintar?

Dalam konteks melakukan apapun adakalanya tujuan, adanya banyak atau sederet rencana dan harapan justru malah membelenggu kita. Kita memang fokus pada rel tujuan namun fokus di sini justru menafikan peluang lain yang ada di luar rencana atau tujuan kita, yang sebetulnya adakalanya malah lebih menjanjikan. Betul?

Itulah setidaknya penggalan pesan yang bisa saya tangkap dari maksud Bob Sadino mengapa berbisnis itu tak perlu pakai tujuan, tak perlu pakai rencana seperti kontingensi plan, adanya banyak plan-plan seperti plan A, plan B, plan C, dst. Dan juga tak perlu sebuah harapan.

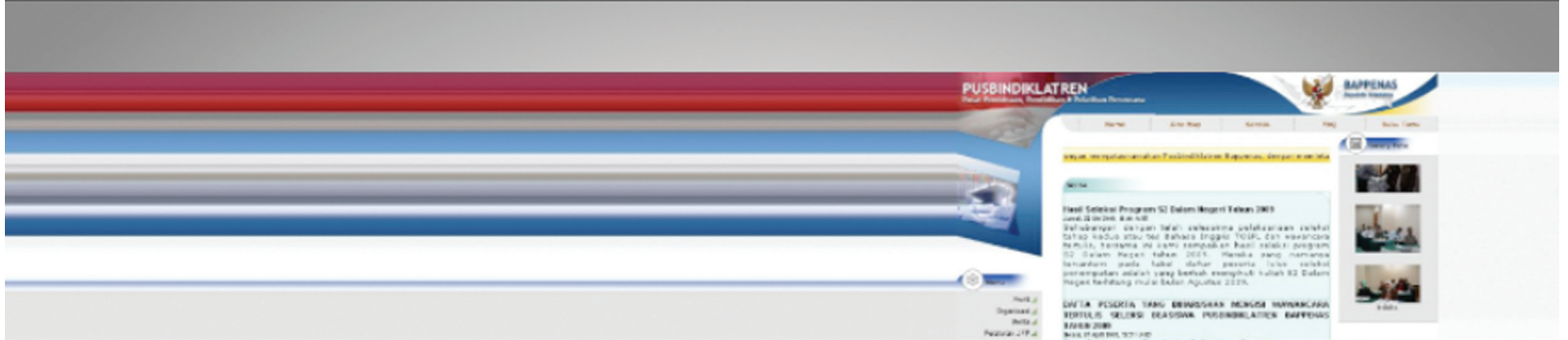
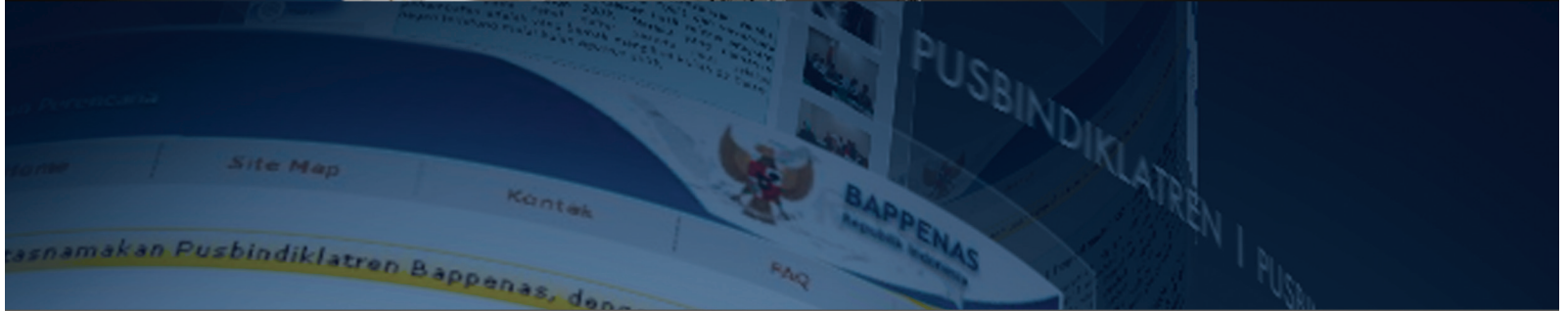
Anda ingin tahu selengkapkannya bagaimana belajar pakai cara "Goblok" agar menjadi pintar, silahkan baca bukunya. Baca buku "Belajar Goblok Dari Bob Sadino" yang ditulis oleh Dodi Mawardi.

Sumber: <http://www.diptara.com/>



PUSBINDIKLATREN

- Profil
- Organisasi
- Berita
- Peraturan JFP
- Program Diklat
- Kalender Kegiatan
- Publikasi
- Quick Links
- Formulir Diklat Gelar



PUSBINDIKLATREN
www.pusbindiklatren.bappenas.go.id